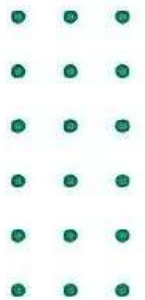


LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II

BALAI POM DI BANYUMAS
2025



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di 4 (empat) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap, serta merangkum hasilnya dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan wujud pertanggungjawaban kepada pemerintah terkait penggunaan

anggaran negara dan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Banyumas pada tahun mendatang.

Upaya pembangunan di sektor pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, yang turut mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pemangku yang berkepentingan terkait capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II, beserta evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja dan realisasi anggaran.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja Balai POM di Banyumas serta semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Banyumas, 10 Juli 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Banyumas,



Gidion, S.Si, M.Si.

NIP. 19810717 200604 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	8
RINGKASAN EKSKLUSIF	9
HIGHLIGHT KINERJA	12
BAB I PENDAHULUAN	26
1.1. Latar Belakang	26
1.2. Gambaran Umum Organisasi	26
1.3. Struktur Organisasi	33
1.4. Isu Strategis	35
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
2.1. Uraian Singkat Renstra	37
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	37
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	37
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	40
2.5. Metode Pengukuran	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	46
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	94
3.3. Realisasi Anggaran	101
BAB IV PENUTUP	104
4.1 KESIMPULAN	104
4.2 SARAN	104
LAMPIRAN	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025	40
Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2025	43
Tabel 2. 3 Predikat Berdasarkan Kriteria NPSS	44
Tabel 2. 4 Tingkat Efisiensi	45
Tabel 3. 1 Capaian NPSS	46
Tabel 3. 2 Capaian NPSS Secara Total	46
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025	48
Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	49
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	49
Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025.....	51
Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	51
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	51
Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025	53
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	53
Tabel 3. 11 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	53
Tabel 3. 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT Triwulan II Tahun 2025.....	55
Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT Terhadap Target Tahunan	55
Tabel 3. 14 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	55
Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan II 2025	56
Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Terhadap Target Tahunan	57



Tabel 3. 17 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder .	57
Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025	58
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	58
Tabel 3. 20 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	59
Tabel 3. 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025	60
Tabel 3. 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	60
Tabel 3. 23 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	60
Tabel 3. 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025	61
Tabel 3. 25 Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	62
Tabel 3. 26 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	62
Tabel 3. 27 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025	63
Tabel 3. 28 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	63
Tabel 3. 29 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	64
Tabel 3. 30 Capaian Indikator Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025	65
Tabel 3. 31 Capaian Indikator Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	65
Tabel 3. 32 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	65
Tabel 3. 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025	66
Tabel 3. 34 Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan	66
Tabel 3. 35 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67
Tabel 3. 36 Capaian Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan.....	68



Tabel 3. 37 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Triwulan II 2025	71
Tabel 3. 38 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Terhadap Target Tahunan	71
Tabel 3. 39 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT.....	71
Tabel 3. 40 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II 2025	73
Tabel 3. 41 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Terhadap Target Tahunan	73
Tabel 3. 42 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	74
Tabel 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II 2025	75
Tabel 3. 44 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Terhadap Target Tahunan	75
Tabel 3. 45 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman	75
Tabel 3. 46 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II 2025	78
Tabel 3. 47 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Terhadap Target Tahunan	78
Tabel 3. 48 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	78
Tabel 3. 49 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Triwulan II 2025	82
Tabel 3. 50 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Terhadap Target Tahunan.....	82
Tabel 3. 51 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.....	82
Tabel 3. 52 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II 2025.....	84
Tabel 3. 53 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Terhadap Target Tahunan	84
Tabel 3. 54 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
Tabel 3. 55 Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Triwulan II 2025.....	86



Tabel 3. 56 Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Terhadap Target Tahunan	86
Tabel 3. 57 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar.....	86
Tabel 3. 58 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT.....	87
Tabel 3. 59 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM.....	89
Tabel 3. 60 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....	90
Tabel 3. 61 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	91
Tabel 3. 62 Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Triwulan II 2025	92
Tabel 3. 63 Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Terhadap Target Tahunan	92
Tabel 3. 64 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.....	93
Tabel 3. 65 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Nilai Core Value Ber-AKHLAK.....	29
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai POM.....	34
Gambar 1. 3 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	35
Gambar 3. 1 Capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II.....	47
Gambar 3. 2 Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT.....	48
Gambar 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM di Banyumas.....	66
Gambar 3. 4 Capaian Sasaran Strategis 3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas.....	67
Gambar 3. 5 Capaian Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Efektivitas KIE di Wilayah Kerja Balai POM Banyumas.....	70
Gambar 3. 6 Capaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu.....	81
Gambar 3. 7 Capaian Sasaran Strategis 8: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas.....	83
Gambar 3. 8 Capaian Sasaran Strategis 7: Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT.....	85
Gambar 3. 9 Capaian Sasaran Strategis 8: Layanan Publik Balai POM di Banyumas yang Prima.....	87
Gambar 3. 10 Capaian Sasaran Strategis 9: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.....	89
Gambar 3. 11 Tabel Efisiensi Anggaran Balai POM di Banyumas.....	102



RINGKASAN EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Banyumas Triwulan II Tahun 2025 berisi capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2025 yang diukur berdasarkan berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Laporan Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama Balai POM di Banyumas menjadi Balai berdasarkan Peraturan Badan POM No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan POM. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan Program yang dicapai terangkum dalam 9 Sasaran Strategis.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang dilakukan Dari 9 Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	% Capaian terhadap Target Triwulan II	Kriteria
Capaian Sasaran Strategis 1	102,68	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 2	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 3	-	N/A
Capaian Sasaran Strategis 4	100,46	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 5	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 6	105,40	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 7	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 8	-	N/A
Capaian Sasaran Strategis 9	102,86	SANGAT BAIK
NPS Total	101,63	SANGAT BAIK



Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 1** sebesar 102,68 dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan II 2025.
2. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 2** sebesar 100 dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah meningkatkan efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
3. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 3** sebesar 0 dikarenakan penilaian indikator sasaran strategis ini dinilai pada akhir tahun, nilai target pada akhir tahun.
4. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 4** sebesar 100,46 dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah meningkatkan efektivitas KIE pada Triwulan II tahun 2025.
5. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 5** sebesar 100 dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas sudah meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada Triwulan II tahun 2025.
6. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 6** sebesar 105,40 dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas sudah melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif pada Triwulan II tahun 2025.
7. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 7** sebesar 100 dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas mampu melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif;
8. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 8** sebesar 0 dikarenakan penilaian indikator sasaran strategis ini dinilai pada akhir tahun, nilai target pada akhir tahun;
9. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 9** sebesar 102,86 dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang optimal.

Nilai NPSS Balai POM di Kab. Banyumas pada Triwulan II yaitu **101,63** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Dengan nilai pencapaian sasaran strategis yang demikian, Balai POM di Banyumas tidak menemukan kendala yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja berjalan lancar dan efektif, didukung oleh kerja sama yang solid antara tim internal dan mitra kerja terkait. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen Balai POM di Banyumas dalam menjaga kualitas pengawasan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Program pengawasan obat dan makanan dan dukungan manajemen Balai POM di Banyumas Tahun 2025 di catchment area pengawasan obat dan makanan di 4 (empat) kabupaten yang telah dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp 8.033.570.000,-. Anggaran terblokir AA sebesar Rp.4.485.016.000,- sehingga anggaran yang bisa dipakai



pada TW II sebesar Rp. 3.548.554.000,- dari total anggaran tersebut, pada Triwulan II tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 1,940,685,414, - atau 54,69%.

Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Balai POM di Banyumas mencatat perbandingan antara realisasi anggaran dan pencapaian target kegiatan pengelolaan anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar 55%, yang termasuk dalam kriteria "Tidak Efisien". Data perhitungan tersebut bersumber dari laporan e-performance, di mana nominal pagu yang digunakan masih merujuk pada pagu anggaran sebelum terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Balai POM di Banyumas tetap berkomitmen untuk melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran pada triwulan berikutnya melalui strategi penyesuaian prioritas kegiatan, peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya, dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait guna mencapai efisiensi yang lebih baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan Masyarakat.



HIGHLIGHT KINERJA

1. Pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Balai POM di Banyumas



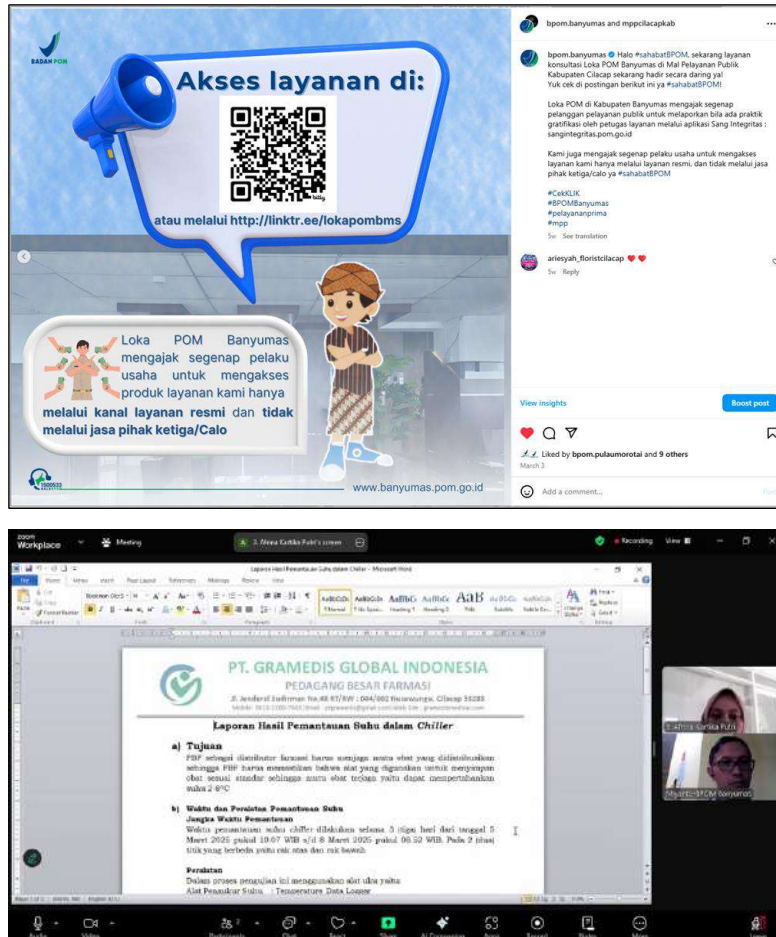
Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banyumas resmi mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Purbalingga pada Rabu, 25 Juni 2025. Pencanangan ini menjadi langkah awal untuk membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Bersamaan dengan itu, Balai POM di Banyumas telah menyusun dan melaksanakan 35 program kerja yang terbagi dalam enam kelompok, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Percepatan Pelayanan Publik.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, Anggota DPR RI, Teti Rohatiningsih dan Rofik Hananto, serta sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, Yenni Bahar, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, perwakilan kepolisian dan kejaksaan, serta organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hadir pula perwakilan dari Direktorat Registrasi OTSKK BPOM serta UPT Badan POM dari



Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Kediri. Seluruh tamu undangan turut menandatangani komitmen bersama untuk mendukung Zona Integritas di lingkungan Balai POM Banyumas.

2. Loker Pelayanan Publik secara Online (Zoom Meeting)



Menindaklanjuti adanya kebutuhan masyarakat yang semakin luas akan pelayanan publik yang mudah dijangkau, Balai POM di Banyumas menghadirkan Loker Pelayanan Publik secara Online (Zoom meeting). Layanan ini dilakukan dari Senin hingga Jumat, Pukul 8:00 hingga 15:15 WIB. Layanan ini dilaksanakan terutama untuk menjangkau pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara yang mengalami kesulitan dalam menjangkau Loker pelayanan Balai POM di Banyumas karena terkendala jarak yang jauh. Pada Bulan April, telah dilaksanakan pelayanan konsultasi untuk satu pelaku usaha di Kabupaten Cilacap. Pelayanan Publik secara Online (Zoom Meeting) ini akan dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun 2025.



3. Pengawasan Kearsipan Internal 2025 Balai POM di Banyumas



Balai POM di Banyumas berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas melalui Pengawasan Kearsipan Internal 2025. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Transformasi Diri Lewat SUMRINGAH, BPOM Banyumas Hadirkan Role Model ASN Berprestasi



Balai POM di Banyumas menggelar program Support Mental dan Religi untuk Gapai Harmoni (SUMRINGAH) tanggal 5 Juni 2025 secara daring dengan tema “Growth Mindset untuk Kinerja Gemilang” sebagai upaya pembinaan mental dan motivasi pegawai. Menghadirkan Ayu Zefania Kristianti Pailang, Pegawai Berprestasi BPOM Terbaik I Tahun 2025, kegiatan ini mengajak peserta memahami pentingnya pola pikir berkembang, ketangguhan mental, serta budaya kerja positif. Ayu membagikan refleksi karirnya dan menginspirasi peserta untuk melihat tantangan sebagai peluang. Koordinator Tata Usaha, Raden Satriya Pinandhita, menegaskan pentingnya mindset sehat dan konsisten dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Program ini diharapkan mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional seluruh pegawai BPOM.



5. Balai POM di Banyumas Latih Kader Desa Demi Wujudkan Kemandirian Keamanan Pangan



Balai POM di Banyumas melatih 25 kader keamanan pangan dari Desa Danasri Kidul dan sekitarnya melalui Bimbingan Teknis dalam rangka Program Aksi Nasional Keamanan Pangan Desa pada tanggal 20 Mei 2025. Kegiatan yang melibatkan narasumber dari Dinas Kesehatan Cilacap dan Puskesmas Nusawungu ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat desa dalam menjaga keamanan pangan dari hulu ke hilir. Kepala Balai POM di Banyumas, Gidion, menegaskan pentingnya budaya sadar pangan aman di tingkat rumah tangga, usaha, dan sekolah, serta menekankan peran aktif kader dalam keberhasilan program. Kegiatan juga dirangkai dengan ajakan minum jamu bersama melalui Program JAWARA untuk memperingati Hari Jamu Nasional, sebagai wujud pelestarian kearifan lokal. Program ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Cilacap.

6. Balai POM di Banyumas Jalin Kerja Sama Akademik dengan Universitas Muhammadiyah Gombong



Balai POM di Banyumas menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO) pada tanggal 16 Mei 2025 melalui penandatanganan perjanjian di bidang akademik dan pengabdian masyarakat terkait pengawasan Obat dan Makanan. Kerja sama ini mencakup pelaksanaan PKPA, keterlibatan dalam program strategis BPOM, serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kepala Balai POM, Gidion, menyampaikan apresiasi atas komitmen UNIMUGO dalam pengembangan SDM, sementara Rektor UNIMUGO menyambut baik sinergi ini untuk meningkatkan kualitas lulusan di wilayah Gombong dan sekitarnya. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret memperkuat pengawasan obat dan makanan secara berkelanjutan.

7. Balai POM di Banyumas Siapkan Pasar Tanjungsari Jadi Pasar Pangan Aman



Balai POM di Banyumas bersama lintas sektor menggelar Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Pasar Tanjungsari sebagai bagian dari Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) tanggal 14 Mei 2025. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Cilacap, serta mengedukasi pengelola pasar dan pedagang mengenai lima kunci keamanan pangan, higiene sanitasi, deteksi bahan berbahaya dengan rapid test kit, dan pentingnya CEK KLIK. Peserta dari Pasar Tanjungsari, Pelem Gading, dan Saliwangi berkomitmen menerapkan ilmu yang diperoleh dan menyebarkannya secara berantai demi mewujudkan pasar yang lebih aman dan sehat.



8. Kolaborasi Balai POM di Banyumas dan PPJAI dalam Sinergi Pentahelix 2025 untuk Jamu Nasional



Kegiatan Sinergitas Pentahelix 2025 yang diselenggarakan oleh Balai POM di Banyumas bersama PPJAI pada 25 Juni 2025 di Purbalingga merupakan upaya strategis untuk memperkuat ekosistem jamu nasional sebagai warisan budaya dan peluang ekonomi. Mengusung tema “Meracik Masa Depan Ekonomi Indonesia dengan Jamu Sebagai Warisan dan Peluang Ekonomi”, kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam semangat kolaborasi pentahelix. Rangkaian acara dimulai sejak 24 Juni dengan layanan registrasi produk jamu, dilanjutkan dialog interaktif dan lomba meracik jamu. Komitmen penguatan UMKM jamu ditegaskan oleh Kepala Balai POM di Banyumas, sementara Ketua Umum PPJAI menyoroti kontribusi industri jamu terhadap tenaga kerja dan pemanfaatan bahan lokal. Dukungan dari DPR RI dan Pemerintah Daerah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan jamu sebagai pilar ekonomi dan identitas bangsa.

9. Balai POM di Banyumas Dorong Keamanan Pangan Lewat Bimtek Komunitas di Danasri Kidul



Balai POM di Banyumas tanggal 23 Juni 2025 menyelenggarakan Bimbingan Teknis Komunitas di Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, yang diikuti 25 peserta dari berbagai kalangan, seperti pelaku usaha pangan, ibu rumah tangga, remaja, dan sekolah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting, dengan materi utama tentang 5 Kunci Keamanan Pangan dan kaitannya dengan gizi serta bahaya keracunan dan alergi. Selain itu, peserta juga mendapat edukasi mengenai pentingnya konsumsi protein seimbang selama 1000 HPK dan solusi praktis atas permasalahan gizi harian. Kegiatan ditutup dengan ajakan untuk terus menerapkan pola konsumsi pangan yang aman dan sehat demi keluarga yang lebih kuat.

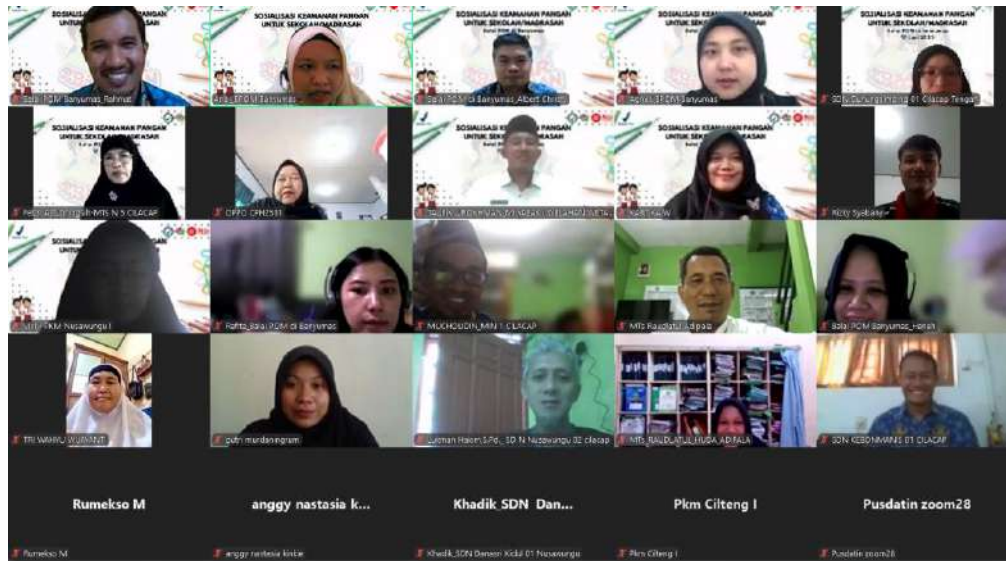
10. Implementation of Arrangement Kegiatan Magang MBKM dengan Fakultas Biologi Unsoed



Pada tanggal 20 Juni 2025, Balai POM di Banyumas dan Fakultas Biologi Unsoed melaksanakan Penandatanganan Implementation of Arrangement (IA) terkait dengan Kegiatan Magang MBKM. Balai POM di Banyumas berkenan menjadi tempat magang khususnya bagi Program S1 Biologi untuk program MBKM. Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai POM di Banyumas, Gideon, S.Si., M.Sc. bersama Albert Christy Saragih, S.Farm., Apt. dalam hal ini (sebagai mentor mahasiswa magang), memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan selama magang yaitu sebagai Fasilitator Keamanan Pangan dan membantu UMKM untuk melakukan praktik baik terkait dengan CPPOB.



11. Balai POM di Banyumas Edukasi Sekolah soal Keamanan Pangan lewat Webinar PJAS Aman



Balai POM di Banyumas mengedukasi 45 peserta dari sekolah dan madrasah di Kabupaten Cilacap melalui Webinar Sosialisasi Keamanan Pangan pada tanggal 17 Juni 2025 sebagai bagian dari Program PJAS Aman. Kegiatan yang disiarkan langsung di YouTube ini melibatkan lintas sektor seperti Kemenag, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas setempat, serta menghadirkan materi tentang bahaya pangan, cara memilih pangan aman, pemanfaatan informasi gizi, dan program keamanan pangan di sekolah. Melalui sambutan dan materi dari Rahmat Hidayat selaku Ketua Tim Informasi dan Komunikasi, peserta diajak menjadi pelopor pola hidup bersih dan sehat dengan menerapkan keamanan pangan sejak dini di lingkungan pendidikan.

12. Balai POM di Banyumas Buka Layanan Publik di MPP Banjarnegara



Banjarnegara, 5 Mei 2025 – Balai POM di Banyumas menandatangani Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk memperkuat



sinergi pelayanan publik, sekaligus membuka loket layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarnegara. Layanan yang disediakan mencakup sertifikasi sarana produksi, izin edar obat dan makanan, pengaduan, serta informasi publik. Dalam acara yang dihadiri OPD terkait ini, Balai POM juga menyerahkan izin edar produk pangan kepada tiga pelaku usaha lokal sebagai simbol komitmen terhadap pelayanan yang lebih dekat, mudah diakses, dan mendukung pelaku usaha di daerah perifer Banjarnegara.

13. Balai POM di Banyumas Gelar Forum Keterpaduan Pangan di Cilacap



Balai POM di Banyumas menyelenggarakan Forum Advokasi Keterpaduan Pangan di Setda Kabupaten Cilacap dengan melibatkan 45 peserta dari berbagai instansi untuk menguatkan sinergi antar-OPD dalam program Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 15 April 2025. Melalui forum ini, pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem keamanan pangan yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan target intervensi di Desa Danasri Kidul, Pasar Tanjungsari, MTsN 5 Cilacap, dan SDN 1 Gunung Simping. Kepala Balai POM dan Dinas Ketahanan Pangan menegaskan komitmen bersama untuk mengawal keberlanjutan program serta membudayakan konsumsi pangan aman hingga tingkat individu.

14. Monitoring Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Dieng Kabupaten Banjarnegara



Balai POM di Banyumas melaksanakan Monitoring Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Dieng Kabupaten Banjarnegara. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan selama 2 hari yaitu pada 18-19 Juni 2025. Pada hari pertama, Balai POM melakukan pengawasan sarana produksi pangan di beberapa sarana untuk beberapa jenis pangan. Untuk hari kedua, Balai POM melakukan pengawasan sarana distribusi pangan dan sarana pelayanan kefarmasian di wilayah Dieng, Kabupaten Banjarnegara.

15. Operasi Penindakan Balai POM di Banyumas



Operasi Penindakan Balai POM di Banyumas bersama sama dengan tim Direktorat Penyidikan BOM dan tim Badan Narkotika Nasional terhadap sarana produksi obat bahan alam ilegal yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan ,khasiat dan mutu di Rumah Jl.Rajungan No.08 RT 017/RW 002, Desa Sikampuh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Barang bukti yang ditemukan yaitu 12 item bahan baku, 9



item produk setengah jadi, 1 item produk jadi, 2 item kemasan, 6 item alat produksi, dengan total nilai ekonomi sebesar lebih dari 50 juta rupiah.

16. Balai POM dan Polresta Banyumas Ungkap 21 Kasus Narkotika dan Psikotropika



Balai POM di Banyumas bersama Polresta Banyumas mengungkapkan 21 kasus narkoba, psikotropika, dan pelanggaran UU Kesehatan selama Maret–April 2025, dengan barang bukti senilai lebih dari Rp1,1 miliar dan 27 tersangka diamankan. Kepala Balai POM, Gidion, hadir dalam konferensi pers yang menjelaskan peran lembaganya dalam penyidikan, pemberian keterangan ahli, dan edukasi publik melalui program P4GN pada 7 Mei 2025. Barang bukti meliputi sabu, tembakau sintesis, ekstasi, psikotropika, dan obat terlarang yang berpotensi membahayakan lebih dari 56 ribu orang. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kedua institusi dalam mencegah peredaran gelap narkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan obat dan zat berbahaya.

17. Desk Registrasi Pangan Olahan



Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan UMKM terutama di bidang pangan olahan, Balai POM di Banyumas bersama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan mengadakan kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan di kantor Balai POM di Banyumas pada tanggal 23-24 April 2025. Pada kegiatan tersebut, tim evaluator yang terdiri dari 6 orang petugas Direktorat Registrasi Pangan Olahan melayani desk registrasi untuk 32 orang pelaku usaha dengan hasil diterbitkannya persetujuan untuk 3 akun perusahaan, 1 Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan, 2 Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI dan 8 Izin Edar Pangan Olahan.

18. Kolaborasi Pendampingan UMKM Pangan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara



Proses Sertifikasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) merupakan salah satu tahap dalam registrasi pangan olahan yang dianggap sulit dan mahal oleh pelaku usaha pangan terutama pelaku usaha kategori UMKM. Pada tanggal 21 Mei 2025, Balai POM Banyumas bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Banjarnegara mengadakan kegiatan pendampingan untuk 9 pelaku usaha sebagai salah satu upaya untuk menepis stigma tersebut.



Pada kegiatan ini, 3 orang fasilitator dari Balai POM Banyumas mendampingi 9 pelaku usaha pangan yang memproduksi berbagai macam pangan olahan ikan secara intensif, terutama pada aspek persiapan sarana produksi yang sesuai kaidah CPPOB. Dalam pendampingan ini, fasilitator memberikan saran-saran yang bersifat praktis dan teknis untuk membangun sarana produksi yang sesuai kaidah CPPOB namun dengan material dan penataan ruangan produksi yang sekiranya masih bisa dijangkau oleh UMKM, disesuaikan dengan kondisi calon sarana produksi yang sudah ada.

19. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM Pangan



Pada tahun 2025, tim Sertifikasi Balai POM Banyumas melakukan pendampingan terhadap 6 UMKM pangan olahan dari untuk mendapatkan Sertifikat CPPOB. Salah satu tahapan dalam kegiatan pendampingan tersebut adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Tahapan ini dilaksanakan di kantor Balai POM di Banyumas pada tanggal 26-28 Mei 2025. Materi yang diberikan pada bimtek ini meliputi cara penerapan aspek-aspek CPPOB dalam



kegiatan produksi, cara mendokumentasikan proses produksi dengan baik, kebijakan keamanan pangan, sampai dengan teknis pengajuan Sertifikasi CPPOB dan registrasi pangan olahan.

20. Desk Registrasi dan Bimbingan Teknis bagi Petugas Registrasi UMKM Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



Wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas merupakan wilayah yang memiliki banyak produsen obat tradisional. Untuk mendukung percepatan penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) bagi pelaku usaha, Balai POM di Banyumas bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta PPJAI (Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia) mengadakan kegiatan Desk Registrasi dan Bimbingan Teknis bagi Petugas Registrasi UMKM pada tanggal 24-25 Juni 2025.

Dalam kegiatan ini, 5 orang evaluator dari Direktorat Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan melayani 21 pelaku usaha. Jumlah persetujuan atau NIE yang berhasil diterbitkan adalah 7 NIE produk Obat Bahan Alam dan 2 NIE produk Suplemen Kesehatan. Keseluruhan berkas yang dapat diproses lebih lanjut pada proses registrasi sejumlah 34 produk dengan rincian Obat Bahan Alam 29 produk, Obat Kuasi 4 produk, dan Suplemen Kesehatan 1 produk serta persetujuan akun perusahaan sejumlah 8 perusahaan. Selain itu, dilakukan konsultasi 1 permohonan iklan obat bahan alam.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM tidak dapat bertindak sendiri untuk memenuhi kewajiban dan fungsinya, sehingga diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan unik karena dipusatkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan ditegakkan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena tindakan yang diambil harus konsisten dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pengawasan menjadi efektif dan efisien.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPOM perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan digital dan database terintegrasi, dapat membantu memastikan konsistensi dan transparansi dalam pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, BPOM dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjamin keamanan, kualitas, dan kemanfaatan obat serta makanan yang beredar di masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan kesehatan nasional.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Badan POM memiliki 76 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 23 Balai Besar POM, 30 Balai POM, dan 23 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk didalam peraturan tersebut memuat peningkatan klasifikasi status Unit Pelaksana Teknis, yang sebelumnya Loka POM menjadi Balai POM sebanyak 11 (sebelas) unit, yakni:

1. Balai POM di Banyumas;
2. Balai POM di Balikpapan;
3. Balai POM di Indragili Hulu;



4. Balai POM di Dumai;
5. Balai POM di Bima;
6. Balai POM di Sanggau;
7. Balai POM di Tulang Bawang;
8. Balai POM di Tabalong;
9. Balai POM di Ende;
10. Balai POM di Tanjungbalai; dan
11. Balai POM di Baubau.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Balai POM di Banyumas merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut:

a) Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.



- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Visi dan Misi Badan POM Tahun 2025-2029

- Visi: “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.
- Misi:
 1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan BPOM Tahun 2025-2029

Adapun tujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima.



Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Nilai-nilai inti BEAKHLAK berada di balik perbedaan penjabaran nilai-nilai inti, serta Kode Etik dan Kode Etik ASN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Alat Perdata Negara No. 5/2014. Oleh karena itu, Kemenpan RB telah menetapkan nilai inti baru untuk menciptakan persepsi yang sama dengan nilai inti ASN. Nilai inti moralitas juga merupakan peleburan dan penyempitan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah.

BerAKHLAK

Berorientasi pelayanan **Akuntabel** **Kompeten** **Harmonis**
Loyal **Adaptif** **Kolaboratif**



Gambar 1. 1 Nilai Core Value Ber-AKHLAK

Kegiatan Utama

Arah Kebijakan Utama BPOM 2025-2029

1. Penguatan pengawasan *pre-postmarket* dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline;
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;



5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Banyumas menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan:
 - 1) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi pangan dan bahan berbahaya,
 - 2) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif,
 - 3) Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan, dan
 - 4) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Kegiatan untuk melaksanakan keempat program generik (pendukung):
 - 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan,
 - 2) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang,
 - 3) Peningkatan Kompetensi SDM, dan
 - 4) Peningkatan Kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

Kegiatan Prioritas

Strategi BPOM Tahun 2025-2029

1. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang modern dan relevan
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.



8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT merupakan salah satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh Balai POM di Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Balai POM di Banyumas.

- 1) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat terhadap Balai POM di Banyumas.

Strategi ini juga merupakan tindakan nyata implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Banyumas. Peningkatan dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat serta senantiasa mengedepankan inovasi-inovasi di setiap sektor pelayanan publik Balai POM di Banyumas dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Termasuk didalamnya adalah peningkatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang akan bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;

Balai POM di Banyumas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan mengupayakan:

- Peningkatan jumlah sarana Industri dan Distribusi yang memenuhi aspek-aspek Cara Produksi maupun Cara-cara distribusi yang baik.
- Peningkatan jumlah UMKM Pangan dengan proses sterilisasi komersial dengan bahan baku lokal dan Obat Tradisional yang dibina untuk dapat berdaya saing di pasar global.

- 2) Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

Pencapaian peningkatan indeks kesadaran masyarakat 4 (empat) kabupaten/kota terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dilaksanakan melalui optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Upaya intervensi dari sisi demand ini diterapkan melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun lewat penyebaran informasi melalui media luar ruang, media masa dan media elektronik termasuk pemanfaatan media sosial resmi institusi maupun akun pribadi para pegawai Balai POM di Banyumas sebagai sarana efektif penyebaran informasi.

Salah satu alasan lain pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat 4 Kabupaten/Kota jumlah total wilayah pengawasan 5.161,05 km² dan total populasi 6.027.030 penduduk (data BPS). Sehingga berpotensi sebagai pangsa pasar



penjualan Obat dan Makanan secara daring (online). Kemudahan mendapatkan produk dengan harga terjangkau melalui daring membuat kecenderungan pemasaran produk Obat dan Makanan melalui daring (online) meningkat tajam selama sepuluh tahun.

- 3) Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Perwujudan langsung dari tersedianya regulasi dan standar terkini dan memadai di Bidang Obat dan Makanan yang berkekuatan hukum terukur melalui peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Balai POM di Banyumas juga melaksanakan optimalisasi Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

- 4) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan Kinerja Balai POM di Banyumas

Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, Efisiensi tata kelola Sumber Daya diharapkan efektif untuk meningkatkan citra Balai POM di Banyumas sebagai Institusi yang terpercaya di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dalam opini masyarakat dengan melahirkan terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. "Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Penilaian terhadap keberhasilan strategi ini diperoleh melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Banyumas.

- 5) Terbangunnya Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan dapat mendukung sistem pengawasan OM mengikuti Perkembangan Teknologi

Dalam rangka peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan data base pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas berupaya mewujudkan terbangunnya Sistem Operasional Termasuk TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan didukung Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi terkini. Dampak langsung dirasakan terhadap percepatan penyelesaian proses-proses pengawasan



Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 (lima) tahun yaitu sesuai dengan RPJMN 2025 - 2029. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

- 6) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi

Balai POM di banyumas memiliki inovasi pelayanan publik “Mas Lakon” (Balai POM Banyumas melayani konsultasi secara online & mobling) dimaksudkan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, disamping pengawasan yang secara rutin telah dilaksanakan. Hal ini menjawab semakin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya ekspektasi masyarakat kepada BPOM. Hal tersebut sejalan dengan arahan pelayanan publik secara online di MPP Kabupaten, yang mana Balai POM Banyumas menyediakan layanan konsultasi melalui zoom.

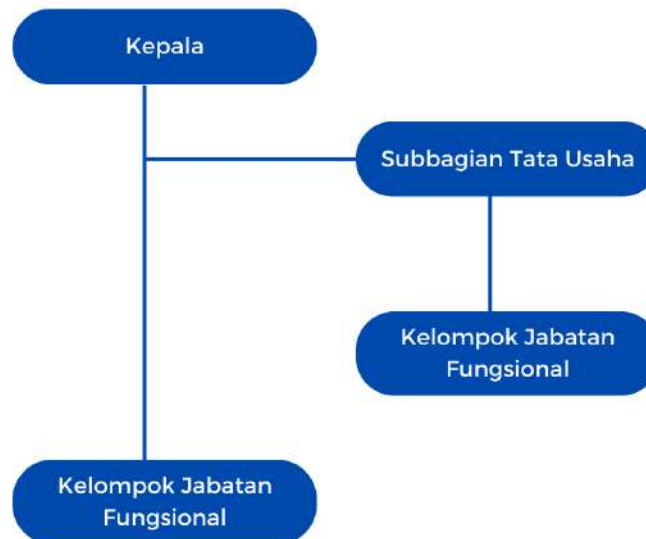
Dengan inovasi tersebut, Balai POM di Banyumas berharap dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar terutama di wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas, aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

1.3. Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) UPT Badan POM antara lain Balai Besar POM di Semarang, Balai POM di Surakarta, dan Balai POM di Banyumas. Balai POM di Banyumas memiliki struktur organisasi seperti Gambar 1.2 berikut:





Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai POM

Analisis Lingkungan Strategis

a. Sumber Daya Manusia

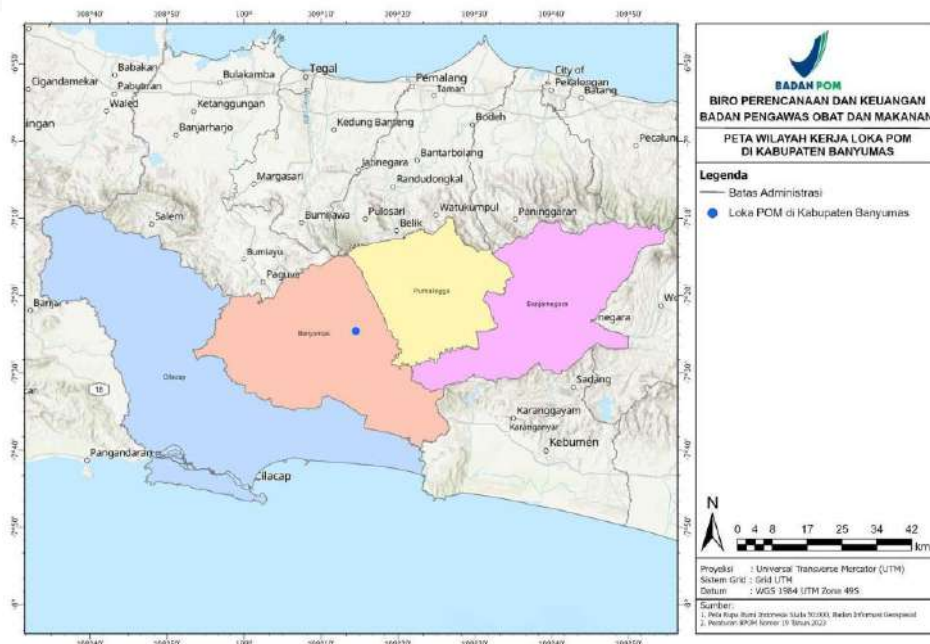
Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Banyumas pada per Juni Tahun 2025 adalah sebanyak 40 orang, terdiri dari 34 orang ASN (dengan rincian 31 PNS dan 3 PPPK) serta 1 orang PNP dan 5 orang outsourcing. Pada Triwulan I tahun anggaran 2025, Balai POM di Banyumas menerima tambahan 2 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai formasi PNS dengan jabatan PFM Ahli Pertama dan PFM Ahli Muda. Kemudian, pada Triwulan II tahun anggaran 2025, Balai POM di Banyumas menerima tambahan 5 pegawai, yang terdiri dari 4 pegawai formasi CPNS dengan formasi PFM Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Analis SDM Ahli Pertama, dan Pranata SDM Aparatur Terampil serta 1 PPPK.

b. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Kabupaten

Wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas terdiri atas 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.328 km², Kabupaten Cilacap 2.252 km², Kabupaten Purbalingga 777,6 km², dan kabupaten Banjarnegara 1.070 km², yang mana keempat Kabupaten tersebut apabila dijumlahkan memiliki total luas wilayah 5.427,6 km².

Total penduduk dari 4 kabupaten tersebut sesuai data BPS tahun 2023 sejumlah 5.969.680 dengan rincian Kabupaten Cilacap 2.027.380 jiwa, Kabupaten Banyumas 1.847.100 jiwa, Kabupaten Purbalingga 1.037.640 dan Kabupaten Banjarnegara 1.057.560 jiwa.





Gambar 1. 3 Peta Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Badan POM No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan POM menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Balai POM di Banyumas.

1.4. Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Banyumas dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Banyumas perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

INTERNAL

Di dalam Daftar Risiko (Risk Register) Balai POM di Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, yang secara rutin diupdate satu tahun satu kali. Berikut ini daftar isu baik internal di Balai POM di Banyumas:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai beban kerja;
2. SDM terbatas (banyaknya permintaan sebagai narasumber dan permintaan petugas di Mal Pelayanan Publik (MPP) di masing-masing kabupaten dan ketersediaan anggaran untuk operasionalnya);
3. Keterbatasan SDM untuk menyelesaikan dan mengadministrasikan urusan ketatausahaan (sarana prasarana dan urusan umum);
4. Balai tidak memiliki laboratorium uji, gedung kantor masih sewa dan SDM masih terbatas;
5. Belum adanya alat khusus (alsus) untuk mendukung kegiatan intelijen;
6. Perbedaan persepsi petugas dalam pengambilan keputusan temuan dalam pemeriksaan sarana pangan;



7. Gedung kantor masih berstatus Sewa/ Kontrak, menunggu persetujuan pengadaan Tanah dan Bangunan yang telah diajukan di RKBMN;
8. Kurangnya kendaraan operasional yang digunakan untuk kegiatan onsite masing-masing fungsi;
9. Terbatasnya jumlah anggaran.

EKSTERNAL

Di dalam Daftar Risiko (Risk Register) Balai POM di Kabupaten Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, yang secara rutin diupdate satu tahun satu kali. Berikut ini daftar isu eksternal di Balai POM di Banyumas:

1. Kewenangan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan belum dilaksanakan secara optimal;
2. Kesulitan pelaku usaha industri pangan terutama UMKM dalam dokumentasi baik proses produksi maupun dokumentasi *higiene* sanitasi;
3. Perubahan regulasi dari PIRT ke MD terhadap beberapa produk pangan skala IRT;
4. Penggunaan bahan tambahan terlarang dan BTP melebihi batas di sarana produksi dan distribusi pangan;
5. Praktek dispensing dari Nakes dan Apotek melakukan distribusi Obat ke nakes;
6. Pengetahuan masyarakat terkait Obat dan Makanan Aman masih belum maksimal;
7. Masih kurang konsistennya pelaku usaha pangan dalam menjaga hygiene sanitasi, kurangnya pengetahuan dari penanggung jawab sarana dan pekerja mengenai HACCP dan hygiene sanitasi;
8. Ketidakesesuaian pengelolaan sediaan farmasi di apotek dan PBF dengan regulasi yang berlaku;
9. Perkembangan social media di bidang promosi kosmetik mendorong munculnya pelaku usaha baru untuk mendapatkan market share dari pembeli millennial yang jumlahnya semakin meningkat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Renstra Badan POM 2025-2029 belum ditetapkan namun arah kebijakan dan strategi Badan POM Tahun 2025-2029 yang telah disusun dapat dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan POM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Arah kebijakan dan strategi Badan POM Tahun 2025 diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan Balai POM di Banyumas 2025 telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Banyumas melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Banyumas dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 9 Sasaran Strategis yang diukur melalui 24 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Balai POM di Banyumas. Anggaran awal untuk Balai POM di Banyumas pada program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp5.074.218.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp2.959.352.000. Namun, setelah efisiensi anggaran, pagu yang dapat digunakan untuk program pengawasan obat dan makanan menjadi Rp835.071.000, sedangkan untuk program dukungan manajemen menjadi Rp2.713.483.000. Meskipun terjadi pengurangan pagu, Balai POM di Banyumas tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan dengan efektif dan efisien.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja wajib disusun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, sehingga Balai POM di Banyumas sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM harus menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Perjanjian Kinerja juga digunakan pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja dan sebagai acuan menilai keberhasilan organisasi.



Secara rinci, target Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025		ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	%	33,555,000
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	%	29,180,060
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	%	320,660
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	%	2,565,280
		06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96	%	6,418,560
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	%	23,368,000
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	%	51,380,000
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	%	189,989,440
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	%	31,070,500



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	ANGGARAN
		ketentuan		
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.58 %	3,907,500
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 %	6,204,000
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 jumlah	96,016,000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.71 nilai	112,217,000
		02 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Jumlah sekolah	87,993,000
		03 Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah desa	144,525,000
		04 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah pasar	92,341,000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 %	35,205,000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 %	104,479,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025		ANGGARAN
	wilayah kerja UPT					
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	%	45,879,000
8	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75	Indeks	72,024,000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02	Nilai AKIP UPT BPOM	77.96	%	6,768,200,000
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Indeks	31,930,000
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8	Indeks	2,130,000
		05	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	%	62,672,000

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Berikut adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2025:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	82	82
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	75	75	75	75



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
	kerja UPT		ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0	100	100	100
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85
		06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96	96	96	96
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.58	88.58	88.58	88.58
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63	63	63	63
3	Menguatnya Lab Pengawasan	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi	0	0	10	11



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.71	87.71	87.71
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	50%	75%
		03	Jumlah desa pangan aman	0	75%	100%
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	75%	100%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20	50	75
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	9	68	72
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50
8	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0
9	Terwujudnya tata	01	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
	kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	5
		03	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	2.8
		04	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	50	75	100

Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2025

2.5. Metode Pengukuran

Pengumpulan dan pengolahan data untuk mengukur kinerja melibatkan seluruh anggota unit kerja di Balai POM Banyumas. Setiap tim bertanggung jawab menyusun laporan kinerja berdasarkan data yang akurat dan valid, yang kemudian diintegrasikan menjadi laporan kinerja menyeluruh. Data yang terkumpul mencakup indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan strategis Balai POM Banyumas.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nilai Sasaran Strategis (NSS). NSS memiliki kriteria-kriteria tertentu. NSS diperoleh melalui pengukuran capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan untuk mendapatkan % capaian kinerja terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian kinerja. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 indikator, maka diambil rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya dikalikan dengan bobotnya (1). Berikut rumus perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS):

$$NSS = \frac{\{(bobot \times \% \text{ capaian})_1 + (bobot \times \% \text{ capaian})_n\}}{n}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:



Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 2. 1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS sebagai berikut:

$$NPS_2 = \frac{1NPI1 + 1NPI2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI1 + 1NPI2 + 1NPI3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI1 + 1NPI2 + 1NPI3 + 1NPI4}{4}$$

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan Predikat Kinerja Organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS. Predikat kinerja organisasi mengacu pada kriteria NPSS sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	< 50	

Tabel 2. 3 Predikat Berdasarkan Kriteria NPSS

Selain itu, juga dilakukan perhitungan atas Efisiensi Kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan



input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 2. 4 Tingkat Efisiensi



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selama Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Banyumas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Balai POM di Banyumas terus berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini. Berikut adalah capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II Tahun 2025:

Sasaran Strategis	% Capaian terhadap Target Triwulan II	Kriteria
Capaian Sasaran Strategis 1	102,68	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 2	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 3	-	N/A
Capaian Sasaran Strategis 4	100,46	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 5	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 6	105,40	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 7	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 8	-	N/A
Capaian Sasaran Strategis 9	102,86	SANGAT BAIK

Tabel 3. 1 Capaian NPSS

Dari 9 Sasaran Strategis, capaiannya 4 masuk kategori sangat baik, 3 kategori baik, dan 2 sasaran strategis dinilai pada akhir tahun.

Sasaran Strategis	% Capaian terhadap Target Triwulan II	Kriteria
NPSS TOTAL	101,63	SANGAT BAIK

Tabel 3. 2 Capaian NPSS Secara Total

Secara total capaian kinerja Balai POM di Banyumas masuk kategori sangat baik, secara umum dapat mencapai target kinerja di TW II.



Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahunan	Target Bulanan N	Realisasi TW I			% Capaian Thd Target Bulan N	% Capaian Normalisasi	% Capaian Thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSS1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,00	82,00	0	0	83,32	101,61		101,61
		IKSS2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	0	0	78,99	105,32		105,32
		IKSS3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	0	0	85,00	100,00		100,00
		IKSS4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00		100,00
		IKSS5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,00	96,00	0	0	96,43	100,45		100,45
		IKSS6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	0	0	87,50	102,94		102,94
		IKSS7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	0	0	83,33	104,16		104,16
		IKSS8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	93,25	0	0	93,87	100,66		100,66
		IKSS9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	0	0	81,54	108,72		108,72
		IKSS10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,58	88,58	0	0	91,17	102,92		102,92
Capaian SS1									102,68	102,68	102,68
SS2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSS11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	63,00	0	0	63,00	100,00		100,00
Capaian SS2									100,00	100,00	100,00
SS3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSS12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	0	0	0	0	-		-
Capaian SS3									-	0,00	-
SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,71	87,71	0	0	89,33	101,85		101,85
		IKSS14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	50	50	100	50%	100,00		25,00
		IKSS15	Jumlah desa pangan aman	1,00	75	75	100	75%	100,00		75,00
		IKSS16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	75	75	100	75%	100,00		75,00
Capaian SS4									100,46	100,46	69,21
SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSS17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	91,00	50,00	50	100	50,00	100,00		54,95
Capaian SS5									100,00	100,00	54,95
SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	68,00	0	0	71,67	105,40		95,56
Capaian SS6									105,40	105,40	95,56
SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	0	0	50,00	100,00		55,56
Capaian SS7									100,00	100,00	55,56
SS8	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSS20	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	0	0	0	0	-		-
Capaian SS8									-	0,00	-
SS9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSS21	Nilai AKIP UPT BPOM	77,96	0	0	0	0	-		-
		IKSS22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90	0	0	0	0	-		-
		IKSS23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	0	0	0	0	-		-
		IKSS24	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	50,00	18	35	51,43	102,86		51,43
Capaian SS9									102,86	102,86	51,43
NPSS TOTAL									101,63	101,63	75,63

Gambar 3. 1 Capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II



ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Banyumas

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahunan	Target Bulanan N	Realisasi TW I			% Capaian Thd Target Bulan N	% Capaian Normalisasi	% Capaian Thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSS1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,00	82,00	0	0	83,32	101,61		▲ 101,61
		IKSS2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	0	0	78,99	105,32		▲ 105,32
		IKSS3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	0	0	85,00	100,00		▲ 100,00
		IKSS4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	0	0	100,00	100,00		▲ 100,00
		IKSS5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,00	96,00	0	0	96,43	100,45		▲ 100,45
		IKSS6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	0	0	87,50	102,94		▲ 102,94
		IKSS7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	0	0	83,33	104,16		▲ 104,16
		IKSS8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	93,25	0	0	93,87	100,66		▲ 100,66
		IKSS9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	0	0	81,54	108,72		▲ 108,72
		IKSS10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,58	88,58	0	0	91,17	102,92		▲ 102,92
Capaian SS1									102,68	102,68	102,68

Gambar 3. 2 Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

IKSS 1: Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Hingga Triwulan II tahun 2025 realisasi Sediaan Farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 83,32% jika dibandingkan dengan target 82%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 101,61% (kategori **Sangat Baik**). Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 1 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesesuaian perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian parameter uji, akurasi dalam penentuan kesimpulan, kesesuaian pelaporan hasil sampling, tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, serta kesesuaian pelaporan monitoring penarikan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	82	0	0	83,32	101,61 Sangat Baik

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	82	0	0	83,32	101,61 Tercapai 

Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	104,27%	101,61%	Turun

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja IKSS 1 telah mencapai target, faktor yang mempengaruhi capaian target IKSS 1 yaitu:

1. Kegiatan yang dilakukan telah mengikuti pedoman sampling, petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait, serta pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang berdampak jumlah sampel komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang memenuhi ketentuan, hasil uji laboratorium memenuhi syarat.
2. Komitmen petugas dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya. sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
3. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing parameter penilaian IKU

b. Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 1 antara lain:



1. Mengikuti pedoman sampling, petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait;
2. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel;
3. Melakukan tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, serta melakukan pelaporan monitoring penarikan;
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPKB dan CPOTB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi maupun label yang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk produk kosmetik.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1. Perencanaan sampling dilakukan atas kesepakatan petugas sampling dan penguji di laboratorium sehingga dapat diantisipasi penolakan sampel karena ada kendala di pengujian.
2. Menjalin komunikasi lintas substansi dan antar balai dalam satu regional laboratorium jika ada kendala terkait sampling dan pengujian.
3. Kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian parameter uji, akurasi dalam penentuan kesimpulan, kesesuaian pelaporan hasil sampling, tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, dan kesesuaian pelaporan monitoring penarikan serta pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana

IKSS 2: Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Hingga Triwulan II tahun 2025 realisasi sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 78,99% jika dibandingkan dengan target 75 %, maka capaian sampai dengan TW II adalah 105,32 % (kategori **Sangat Baik**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 2 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian, serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 2	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	0	0	78,99	105,32 Sangat Baik

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 2	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	0	0	81,25	105,32 Tercapai 

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 2	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	108,33%	105,32%	Turun

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kegiatan yang dilakukan telah mengikuti pedoman sampling, petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait, serta pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan yang berdampak jumlah sampel komoditi pangan yang memenuhi ketentuan, hasil uji laboratorium memenuhi syarat.
2. Perencanaan sampling yang baik dan komitmen petugas sampling dalam pelaksanaan sampling sesuai renlak yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian.



3. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing parameter penilaian IKU.

b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

1. Mengikuti pedoman sampling, petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.
2. Selalu segera melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.
3. Melakukan tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, serta melakukan pelaporan monitoring penarikan.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan baik MD pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPPOB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten pada catchment area Balai POM di Banyumas untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Perencanaan sampling dilakukan atas kesepakatan bersama antara substansi pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di awal tahun dengan memperhatikan ketersediaan reagen/media serta baku pembanding, kondisi instrument uji, sehingga memperlancar proses pengujian sampel di laboratorium.
2. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan lintas substansi dan antar balai dalam satu regional laboratorium dalam perencanaan dan pengiriman sampel pangan olahan yang masuk Regionalisasi
3. Kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian parameter uji, akurasi dalam penentuan kesimpulan, kesesuaian pelaporan hasil sampling, tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, dan kesesuaian pelaporan monitoring penarikan serta pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan onal pada saat pemeriksaan sarana.

IKSS 3: Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Hingga Triwulan I tahun 2025 Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 85% jika dibandingkan dengan target 85%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 100 % (kategori **Baik**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 3 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan, serta tindak lanjut sampel PIRT yang tidak memenuhi syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 3	Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	0	0	85	100 Baik 

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 3	Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	0	0	85	100 Tercapai 

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 3	Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100%	100%	Tidak Ada Perubahan

Tabel 3. 11 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja IKSS 3 dapat mencapai target, faktor yang mempengaruhi capaian target IKSS 3 yaitu kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.



b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

1. Mengikuti pedoman sampling, pengambilan sampel tepat waktu, pelaporan tepat waktu, serta tindak lanjut sampel PIRT yang tidak memenuhi syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan industri rumah tangga pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPPB-IRT serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi maupun label yang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk produk PIRT.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT).

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah kesesuaian target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan, serta tindak lanjut sampel PIRT yang tidak memenuhi syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan industri rumah tangga pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPPB-IRT serta selalu melakukan koordinasi dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT).

IKSS 4: Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT

Hingga Triwulan II tahun 2025 realisasi KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT 100% jika dibandingkan dengan target 100%, maka capaian sampai dengan TW II adalah 100% (Baik). Pada Triwulan II ini tidak terdapat kejadian keracunan pangan, sesuai DO capaian yang tersedia tetap dihitung 100%. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang berasal dari internal dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Untuk mendukung capaian ini, UPT terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan pengawasan dan pengujian pangan dilakukan secara konsisten dan berkualitas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100	0	0	100	100 Baik



Tabel 3. 12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100	0	0	100	100 Tercapai 

Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100%	100%	Tidak Ada Perubahan

Tabel 3. 14 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai sasaran strategis 5 tidak dihitung. Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan triwulan I 2025 karena baik triwulan I dan II tidak terdapat perubahan capaian kinerja. Serta untuk mendukung tercapainya target dilakukan pengujian sampel dengan parameter yang sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

1. Karena tidak ada sampel KLB yang masuk ke laboratorium BPOM di Banyumas, maka tidak dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan.



2. Pengujian sampel dilakukan dengan parameter yang sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.
 3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten pada catchment area Balai POM di Banyumas dalam penanganan dugaan KLB.
- c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja**

Melakukan pengujian sampel dengan parameter yang sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan.

IKSS 5: Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Hingga Triwulan II tahun 2025 realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 96,43 % jika dibandingkan dengan target 96 %, maka capaian sampai dengan TW II adalah 100,45 % (kategori Sangat Baik). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 5 terdiri dari penjumlahan dari jumlah rekomendasi yang diberikan baik kepada pelaku usaha maupun lintas sektor dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 5	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	96	0	0	96,43	100,45 Sangat Baik 

Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan II 2025



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 5	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	96	0	0	96,43	100,45 Tercapai 

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 5	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	102,58%	100,45%	Turun

Tabel 3. 17 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi ketercapaian target IKSS 5 adalah ketepatan waktu petugas memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha atau lintas sektor serta kepatuhan pelaku usaha atau lintas sektor dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang diberikan petugas BPOM. Capaian Triwulan II turun dibandingkan dengan Triwulan I karena ada beberapa pelaku usaha atau sarana yang masih belum menindaklanjuti surat rekomendasi. Namun nilai ini masih masuk kategori Tercapai.

b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 5 antara lain:

1. Petugas selalu membuat surat rekomendasi secara tepat waktu.
2. Melakukan Monitoring evaluasi realisasi dari komponen IKSS setiap bulannya sehingga permasalahan dan kendala dari capaian bulanan dapat lebih awal diantisipasi.



c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja yaitu koordinasi yang baik antara UPT dengan lintas sektor serta pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti surat yang sudah disampaikan.

IKSS 6: Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % sarana produksi Obat, % sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % sarana produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pada Triwulan II tahun 2025 realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 87,50%, jika dibandingkan dengan target 85% maka capaian sampai dengan Triwulan I adalah 102,94% (Kategori **Sangat Baik**).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 6	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	0	0	87,50	102,94 Baik

Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 6	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	0	0	87,50	102,94 Tercapai 

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 6	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa	100%	102,94%	Naik



	dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan			
--	--	--	--	--

Tabel 3. 20 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Penetapan target sarana produksi berdasarkan Analisa Risiko dan pembobotan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya setiap bulan;
2. Ketepatan waktu pelaporan petugas di SIPT atas hasil pemeriksaan yang dilakukan;
3. Kesesuaian dan ketepatan waktu tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan;
4. Capaian kinerja pada IKSS 6 ini fluktuatif dikarenakan tergantung kepada tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi aspek GMP (CPOB, CPOTB, dan CPKB).

b. Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

1. Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak baru dan penjadwalan yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
2. Melakukan Monitoring evaluasi bulanan;
3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggungjawab jadwal membuat renlak baru dan penjadwalan yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
2. Melakukan evaluasi bulanan;
3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui pembinaan teknis.

IKSS 7: Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kerja Sasaran Strategis 7 mengukur Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Pada Triwulan II tahun 2025, realisasi IKSS 7 adalah sebesar 83,33%, jika dibandingkan dengan target 80%,



maka capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 104,16 % berada dalam kategori **Sangat Baik**. Indeks kinerja sasaran strategis 7 terdiri dari penjumlahan sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 7	Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	0	0	83,33	104,16 Sangat Baik 

Tabel 3. 21 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 7	Persentase Sarana produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	0	0	83,33	104,16 Tercapai 

Tabel 3. 22 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 7	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100%	104,16%	Naik

Tabel 3. 23 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor yang mempengaruhi ketercapaian target IKSS 7 adalah yang pertama ketepatan waktu petugas, pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada



tanggal 15 pada bulan berikutnya. Kedua adalah kesesuaian tindak lanjut yaitu kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut.

b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 7 adalah:

1. Petugas melaksanakan tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan;
2. Timeline tindak lanjut ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;
3. Melakukan Monitoring evaluasi realisasi dari komponen IKSS setiap bulannya sehingga permasalahan dan kendala dari capaian bulanan dapat lebih awal diantisipasi.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja yaitu ketepatan waktu petugas, pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan dan kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman Tindak Lanjut.

IKSS 8: Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampai Triwulan II, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah 93,87%. Jika dibandingkan dengan target yaitu 93,25%, capaian terhadap IKSS 8 adalah 100,66 % dengan kriteria **Sangat Baik**. Rincian capaian IKSS 8 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 8	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,25	0	0	93,87	100,66 Sangat Baik

Tabel 3. 24 Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 8	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,25	0	0	93,87	100,66 Tercapai 

Tabel 3. 25 Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 8	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100%	100,66%	Naik

Tabel 3. 26 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Penetapan target sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan Analisa Risiko dan pelaksanaannya sesuai target;
2. Ketepatan waktu pelaporan petugas di SIPT atas hasil pemeriksaan yang dilakukan;
3. Kesesuaian dan ketepatan waktu tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut;
4. Database sarana distribusi yang lengkap untuk tiap komoditi sarana distribusi sehingga memudahkan penentuan target sarana.

b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

1. Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggungjawab jadwal membuat renlak baru dan penjadwalan yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
2. Melakukan Monitoring dan evaluasi bulanan;
3. Petugas membuat surat tindak lanjut tepat waktu dan sesuai dengan pedoman;
4. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan CDOB dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.



c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Tingkat kepatuhan dan pemahaman dari pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku sudah meningkat.

IKSS 9: Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan II tahun 2025, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah 81,54%. Jika dibandingkan dengan target triwulan II yaitu 75 %, capaian terhadap IKSS 9 adalah 108,72% dengan kriteria **Sangat Baik**. Rincian capaian IKSS 9 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 9	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	0	0	81,54	108,72 Sangat Baik

Tabel 3. 27 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 9	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	0	0	81,54	108,72 Tercapai 

Tabel 3. 28 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa	102,67%	108,72%	Naik



	dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan			
--	--	--	--	--

Tabel 3. 29 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Ketepatan waktu pelaporan petugas di SIPT atas hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan
2. Penetapan target sarana dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan;
3. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan pada sarana yang diperiksa.

b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 9 antara lain:

Mempertahankan capaian kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi bulanan.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak baru dan penjadwalan yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
2. Melakukan Monitoring evaluasi bulanan;
3. Pemeriksaan mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait.

IKSS 10: Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan II tahun 2025, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan adalah 91,17%. Jika dibandingkan dengan target triwulan II yaitu 88,58 %, capaian terhadap IKSS 10 adalah 102,92% dengan kriteria **Sangat Baik**. Rincian capaian IKSS 10 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 10	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	88,58	0	0	91,17	102,92 Sangat Baik 



Tabel 3. 30 Capaian Indikator Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 10	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	88,58	0	0	81,17	102,92 Tercapai 

Tabel 3. 31 Capaian Indikator Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 10	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	100,41%	102,92%	Naik

Tabel 3. 32 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Masing-masing PIC Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan mempunyai target/jadwal setiap bulannya (sudah terjadwal);
2. Apabila ada tim yang dinas baik dalam kota maupun luar kota untuk sekalian membantu mencari iklan.

b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

1. Apabila pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak tercapai, maka PIC atau penanggung jawab membuat penjadwalan baru yang sesuai dengan hutang di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan sesuai target yang telah disusun;
2. Dilakukannya Monitoring evaluasi triwulan oleh BPOM Pusat dalam hal ini Kedeputan 2 melalui zoom.

c. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun.



Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSS11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	63,00	0	0	63,00	100,00	100,00	100,00 
Capaian SS2									100,00	100,00	100,00

Gambar 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM di Banyumas

IKSS 11: Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan II tahun 2025, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah 63%. Jika dibandingkan dengan target triwulan II yaitu 63 %, capaian terhadap IKSS 11 ini adalah 100% atau dengan kriteria **Baik**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS11	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	63	0	0	63	100 Baik

Tabel 3. 33 Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS11	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	63	0	0	63	100 Tercapai 

Tabel 3. 34 Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Terhadap Target Tahunan



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 11	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100%	100%	Tidak Ada Perubahan

Tabel 3. 35 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Faktor yang mempengaruhi ketercapaian target IKSS 11 melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disusun serta berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang untuk perencanaan dan pelaksanaan sampling di sarana produksi pangan fortifikasi.

b. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 11 adalah melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disusun serta berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang untuk perencanaan dan pelaksanaan sampling di sarana produksi pangan fortifikasi.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disusun serta berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang untuk perencanaan dan pelaksanaan sampling di sarana produksi pangan fortifikasi.

Sasaran Strategis 3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahunan	Target Bulanan N	Realisasi TW I			% Capaian Thd Target Bulan N	% Capaian Normalisasi	% Capaian Thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSS12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	0	0	0	0	-		-
Capaian SS3									-	0,00	-

Gambar 3. 4 Capaian Sasaran Strategis 3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas



IKSS 12: Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan

Yang di maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personil laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Penilaian SKL level/tingkat 1 adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup = 75%,
- Standar Kompetensi Personil Laboratorium = 10%,
- Standar Alat Laboratorium = 15%

Target Pemenuhan SKL BPOM di Banyumas dengan menggunakan tools perhitungan level/tingkat 1 di dapat nilai pada TW 1 = 5; TW 2 = 7; TW 3 = 9; dan TW 4 = 11%. Standar laboratorium Pengujian level/tingkat 1 merupakan pengujian dengan tingkatan paling sederhana yaitu menggunakan reaksi uji cepat (rapid test kit).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan dilakukan penilaian pada akhir tahun. Nilai sasaran strategis tw 2 sebesar 7 tidak dihitung karena adanya kesalahan saat memasukkan target per bulannya. Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan triwulan I 2025 karena baik triwulan I dan II tidak terdapat capaian kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan	11	0	0	0	-

Tabel 3. 36 Capaian Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan

Standar Kemampuan Laboratorium merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk:

1. Melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan;
2. Menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan; dan



3. Monitoring ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya
Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian IKSS 12 dilakukan pada akhir tahun, untuk mendukung tercapainya target dilakukan upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Balai POM di Banyumas juga melakukan monitoring yang telah dilaksanakan secara berkala tiap triwulan terkait pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium.

Target Pemenuhan SKL BPOM di Banyumas dengan menggunakan tools perhitungan level/tingkat 1 di dapat nilai pada TW 1 = 5; TW 2 = 7; TW 3 = 9; dan TW 4 = 11%. Nilai pemenuhan SKL di BPOM banyumas hingga TW 2 sebesar 7 yang meliputi Persentase Pemenuhan SRL (%) sebesar 3%; Persentase Pemenuhan Peralatan (%) sebesar 3% dan Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%) sebesar 1%. Pemenuhan target 11% akan terpenuhi pada akhir tahun (TW 4). Tetapi karena adanya kesalahan pada penginputan rincian target per bulan pada RAPK maka nilai TW 2 = 7 tidak dapat dihitung.

b. Rencana tindak lanjut

Meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 12 di tahun 2025 yaitu Balai POM di Banyumas akan selalu melakukan capaian pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL), antara lain Peningkatan Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) Laboratorium, peningkatan Pemenuhan Standar peralatan laboratorium, serta Peningkatan Pemenuhan Standar kompetensi personal penguji. Serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui rapat rutin setiap bulan maupun setiap triwulan.

Karena adanya kesalahan pada penginputan rincian target per bulan RAPK maka akan mengusulkan perubahan rincian target per bulan sesuai dengan target SKL, usulan perubahan ini akan direncanakan pada TW 3 di bulan Agustus.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP triwulan II tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025, karena penilaian indikator pada triwulan IV (akhir tahun). Serta adanya program perencanaan pelatihan SDM, perencanaan verifikasi metode analisa dan pengadaan peralatan yang dapat meningkatkan persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.



Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

SS4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,71	87,71	0	0	89,33	101,85		101,85
		IKSS14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	50	50	100	50%	100,00		25,00
		IKSS15	Jumlah desa pangan aman	1,00	75	75	100	75%	100,00		75,00
		IKSS16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	75	75	100	75%	100,00		75,00
		Capaian SS4								100,46	100,46

Gambar 3. 5 Capaian Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Efektivitas KIE di Wilayah Kerja Balai POM Banyumas

IKSS 13: Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Indeks survei KIE dibagi menjadi 2 (dua): survei KIE Tatap Muka dan KIE Media. Indeks survei KIE Tatap Muka diukur melalui 4 (empat) kriteria berikut:

1. Narasumber/Petugas
2. Konten/Informasi
3. Pemahaman Audiens
4. Manfaat

Adapun indeks survei KIE Media diukur terhadap 4 (empat) kriteria tersebut:

1. Sumber Informasi
2. Konten/Informasi
3. Pemahaman Audiens
4. Manfaat

Pada triwulan II realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT tahun 2025 adalah 89,33% dengan target 87,71 % maka capaian dari IKSS 13 adalah 101,85% dengan kriteria **Sangat Baik**. Responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Tatap Muka dan KIE Media Balai POM di Banyumas.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,71	0	0	89,33	101,85 Sangat Baik 

Tabel 3. 37 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,71	-	-	89,33	101,85 Tercapai 

Tabel 3. 38 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92,45%	101,85%	Naik

Tabel 3. 39 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian realisasi IKSS 13 tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal, yakni:

1. Penyampaian KIE memperhatikan kebutuhan informasi Masyarakat
2. Keanekaragaman latar belakang masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan KIE.



3. Pemanfaatan berbagai media komunikasi seperti media sosial, cetak dan elektronik belum maksimal.

b. Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut

Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

1. Memperluas jangkauan KIE melalui peningkatan penyebaran materi KIE dengan melakukan kerjasama stakeholder terkait
2. Peningkatan kapasitas dan wawasan petugas terkait penyusunan dan penyampaian materi KIE kepada masyarakat.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan data pencapaian IKSS 13, dilakukan analisis terhadap komponen program yang telah dilaksanakan selama Triwulan II antara lain:

1. Melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait penyebarluasan materi KIE sehingga memperluas jangkauan peserta ke berbagai lapisan masyarakat.
2. Perencanaan konten/materi KIE sesuai dengan target peserta/audiens yang terstruktur, sistematis dan menarik yang dilaksanakan dalam program Agent of Change yakni KAPIBARA (Kamu Pilih, Kami Bahas Ringkas).
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIE, sehingga dapat mengetahui metode paling efektif yang dapat diberikan kepada masyarakat.

IKSS 14: Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan diampu oleh Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keamanan PJAS di lingkungan sekolah sehingga menjamin pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal tanpa terganggu oleh kasus keamanan pangan (seperti Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, atau stunting).

Tahapan dalam program PJAS Aman ini meliputi Koordinasi dan Advokasi, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi, serta Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman. Balai POM di Banyumas mengampu 2 (dua) target sekolah yang diintervensi, satu dari Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknas), dan satu madrasah di bawah Kantor Kementerian Agama setempat. Kabupaten yang menjadi lokus intervensi adalah Kabupaten yang sama dengan program Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Kabupaten yang diintervensi adalah Kabupaten Cilacap. Target dua Sekolah/Madrasah diubah setelah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU PO), dimana anggaran dan target sekolah intervensi yang hanya 1 (Satu) sekolah, dapat diupayakan untuk dilaksanakan secara efisien sehingga dapat dilaksanakan untuk mengampu dua sekolah. Salah satu upaya pelaksanaan program dengan anggaran yang efisien antara lain dengan melaksanakan tahapan sosialisasi keamanan pangan secara daring sehingga minim biaya.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 14 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilakukan penilaian pada akhir tahun, namun tetap terdapat pemantauan progress kegiatan setiap bulan/triwulannya. Terdapat perubahan metode perhitungan capaian IKSS 14 dari capaian fisik (target 2 sekolah/madrasah pada Desember 2025), menjadi capaian pelaksanaan tahapan (4 tahapan dengan nilai masing-masing tahap 25 persen). Capaian pelaksanaan tahapan ini dipantau setiap bulannya. Pada triwulan II tahun 2025, tahap pelaksanaan kegiatan ini sudah mencapai 50% dengan target triwulan II ini sebesar 50%, sehingga capaian dari IKSS 14 adalah 100% dengan kriteria **Baik**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 14	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	50%	50	100	50%	100 Baik

Tabel 3. 40 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 14	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	50	100	50	25 Perlu upaya keras 

Tabel 3. 41 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 14	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan	0%	100%	Naik



	Pangan			
--	--------	--	--	--

Tabel 3. 42 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan terhadap target tahunan. Progresivitas setiap tahap dihitung sebanyak 25 persen, dengan masing-masing tahap yang dihitung sebagai capaian adalah:

1. Koordinasi dan Advokasi (25%)
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (25%)
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan (25%)
4. Monev dan Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman (25%)

Pada triwulan kedua, tahapan yang ditargetkan sudah selesai adalah tahap pertama hingga kedua (Sosialisasi Keamanan Pangan). Sedangkan realisasi capaian tahapan yang sudah dilaksanakan baru mencapai tahap pertama (Koordinasi dan Advokasi) sehingga capaian baru sebanyak 25%. Penyebab perubahan pelaksanaan terhadap rencana antara lain karena keadaan sekolah intervensi yang melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi rencananya dilakukan pada masa tenggang (masa selesai KBM) sehingga semua guru dapat mengikuti tahapan sosialisasi tersebut dengan seksama dan dapat menerima materi dengan baik.

b. Upaya perbaikan / rencana tindak lanjut

Koordinasi dengan sekolah intervensi untuk segera menjadwalkan tahapan sosialisasi, untuk mencapai tambahan capaian sebanyak 25% pada Triwulan III, dan memastikan target pencapaian tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan terlaksana sesuai rencana (Capaian 75% pada Triwulan III).

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian hingga triwulan II sebanyak 25 % disokong oleh sudah terlaksananya tahapan Koordinasi dan Advokasi Keamanan Pangan pada Bulan April 2025. Namun tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan (bobot 25%) yang rencananya terlaksana pada Bulan Mei 2025 tidak dapat dilaksanakan karena adanya penyesuaian jadwal dengan Kegiatan Belajar Mengajar yang baru selesai pada Bulan Juni 2025.

IKSS 15: Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 15 adalah Jumlah Desa Pangan Aman dilakukan penilaian pada akhir tahun, namun tetap terdapat pemantauan progress kegiatan setiap bulan/triwulannya. Pada triwulan II tahun 2025 target bulanan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, pada TW I belum di breakdown dalam target bulanan,



tahap pelaksanaan kegiatan ini sudah mencapai 75% dengan target triwulan II ini sebesar 75%, sehingga capaian dari IKSS 15 adalah 100% dengan kriteria **Baik**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 15	Jumlah Desa Pangan Aman	75%	75	100	75%	100 Baik

Tabel 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 15	Jumlah desa pangan aman	1	75	100	75%	75% Akan tercapai 

Tabel 3. 44 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 15	Jumlah desa pangan aman	0%	100%	Naik

Tabel 3. 45 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa.

Desa yang diintervensi adalah desa yang menjadi lokus intervensi stunting. Target desa yang diintervensi 2025 adalah 1 desa, Keberhasilan program ini dapat diukur dengan terpenuhinya beberapa indikator yaitu: 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif; 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa yang diintervensi adalah Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kab Cilacap. Tahapan program desa pangan aman Tahun 2025 yaitu (1) Advokasi



Kelembagaan Desa, (2) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), (3) Bimtek Komunitas Desa, (4) Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor).

Pelaksanaan tahapan program desa pangan, dalam hal pembobotan menjadi penilaian dan target tersendiri meliputi (1) Advokasi Kelembagaan Desa 25%, (2) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) 25%, (3) Bimtek Komunitas Desa 25%, (4) Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) 25%. Pada saat awal penetapan proses tahapan tersebut belum ditetapkan dalam breakdown capaian target tahapan, sehingga untuk memantau pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan efektif melalui tahapan-tahapan maka dilakukan perubahan target bulanan dimulai dari TW2 tahun 2025.

Program Desa Pangan Aman Balai POM di Banyumas Triwulan 2 Tahun 2025 telah sesuai dengan target per tahapan kegiatan yaitu 75%. Realisasi Triwulan 2 tahun 2025 karakteristik dari target Indikator Kinerja Desa Pangan Aman ini bersifat jumlah desa, untuk penilaian tiap bulan merupakan progress tahapan kegiatan.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di kabupaten Cilacap dengan total target desa yang diintervensi tahun 2025 sebesar 1 Desa yang merupakan Desa Stunting. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan di Triwulan 2 tahun 2025 telah selesai 75% yaitu :

1. Advokasi Kelembagaan Desa. Kegiatan ini bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Pada tahun 2025, Koordinasi dan komunikasi internal dan perencanaan kegiatan; advokasi dengan pemda dan linsek terkait di Kabupaten Cilacap dilaksanakan secara luring pada 15 April 2025.
2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa ini bertujuan untuk membekali kemampuan kader tentang Keamanan Pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pada praktek Keamanan Pangan di lingkungannya. Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader Keamanan Pangan yang dilatih di bidang Keamanan Pangan yaitu minimal 5 orang kader per desa dengan rincian 3 kader ibu rumah tangga, 1 Kader sekolah dan 1 kader remaja.
3. Bimtek Komunitas Desa. Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan di lingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Pada kegiatan Bimtek ini juga dilakukan pre-test dan post-test. Berdasarkan data nilai pre-test dan post-test peserta Bimtek, dapat dilihat apakah terdapat adanya peningkatan nilai setelah dilakukan Bimtek.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di kabupaten Cilacap dengan total target desa yang diintervensi tahun 2025 sebesar 1 Desa yang merupakan Desa Stunting.



Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan di Triwulan 2 tahun 2025 telah selesai 75% yaitu tahapan (1) Advokasi Kelembagaan Desa 25%, (2) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) 25%, (3) Bimtek Komunitas Desa 25%. Capaian tahapan kegiatan disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Banyumas. Untuk Aspek Eksternal diantaranya adalah dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang memberikan apresiasi positif sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik. Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu : (1.) Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan (2.) Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama dengan pihak Desa sebagai pelaksana di lapangan sehingga tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

b. Upaya perbaikan / rencana tindak lanjut

Meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 15 di triwulan berikutnya yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai timeline yang sudah ditetapkan Oleh BPOM Pusat dan peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan program dilaksanakan secara berkesinambungan.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian tahapan kegiatan disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Banyumas. Untuk Aspek Eksternal diantaranya:

1. Koordinasi awal dan komunikasi aktif dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan Desa Pangan aman.
2. Dukungan dari stakeholder terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik.
3. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi.
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis kepada Komunitas Desa.
5. Untuk pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan desa yang ditunjukkan dengan adanya SK Tim Keamanan Pangan Desa.

Sementara dari Internal, upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.
2. Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama lintas sektor terkait, pihak Desa/Kelurahan sebagai pelaksana di lapangan sehingga tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.



Kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu mindset masyarakat bahwa keamanan pangan hanya fokus digunakan untuk dilingkungan keluarga sendiri, namun belum disadari sebenarnya bisa memberi manfaat mendorong ekonomi masyarakat dan strategi dalam penurunan angka stunting.

IKSS 16: Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 16 adalah Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan penilaian pada akhir tahun, namun tetap terdapat pemantauan progress kegiatan setiap bulan/triwulannya. Pada triwulan II tahun 2025 target bulanan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan pada TW I belum di breakdown dalam target bulanan, tahap pelaksanaan kegiatan ini sudah mencapai 75% dengan target triwulan II ini sebesar 75%, sehingga capaian dari IKSS 16 adalah 100% dengan kriteria **Baik**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 16	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	75%	75	100	75%	100 Baik

Tabel 3. 46 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 16	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	75	100	75%	75% Akan tercapai 

Tabel 3. 47 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 16	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0%	100%	Naik

Tabel 3. 48 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



Pasar yang menjadi target di indikator ini adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman bebas dari bahan berbahaya jika pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Target tahun 2025 sebanyak 1 pasar tradisional yang akan diintervensi. Sedangkan target triwulanan merupakan persentase progres tahapan yang terlaksana sesuai bobot tiap-tiap tahapan kegiatan. Keberhasilan program ini dapat diukur dengan terpenuhinya beberapa indikator yaitu: 1) Kader pengelola pasar yang aktif; 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas pasar; 3) Mempunyai rencana program pengawalan keamanan pangan yang mandiri (menggunakan dana pasar pemerintah daerah) pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai pasar aman dari bahan berbahaya, Balai POM di Banyumas akan melakukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

1. Advokasi komitmen Pemda dan Lintas Sektor dengan bobot sebesar 25%
2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar + Materi pelatihan Fasilitator dengan bobot sebesar 25%
3. Sosialisasi Keamanan pangan kepada komunitas pasar dengan bobot sebesar 25%
4. Pengawasan Pangan dan Monev Pasar dengan bobot sebesar 25%

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pasar merupakan tempat yang strategis dalam pengawasan Makanan. Dimana masyarakat sebagian besar mendapatkan di pasar. Dari pemeriksaan yang pernah dilakukan masih ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna tekstil, formalin dan boraks. Dan untuk melindungi masyarakat dari makanan yang mengandung bahan berbahaya, BPOM melaksanakan program pasar aman dari bahan berbahaya.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas dilaksanakan di akhir tahun pelaksanaan kegiatan di kabupaten Cilacap dengan total target pasar yang diintervensi tahun 2025 sebesar 1 pasar. Dari seluruh tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang terlaksana sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah selesai 75% adalah Advokasi dengan bobot 25%, Bimbingan Teknis dan penyuluhan Komunitas Pasar dengan bobot 25%, Sosialisasi kepada komunitas pasar dengan bobot 25%. Capaian tahapan kegiatan didukung oleh beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Banyumas diantaranya adalah:



- Dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul lokasi dimana lokus kegiatan dilaksanakan pada tahun 2024. Setiap tahapan kegiatan dikomunikasikan dan disepakati bersama antara pihak pasar, OPD Kab/Kota dan Balai POM di Banyumas.
- Perencanaan dan monitoring serta evaluasi yang baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan dalam evaluasi internal.

b. Upaya perbaikan / rencana tindak lanjut

Meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 16 di triwulan berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring evaluasi sesuai timeline yang sudah ditetapkan oleh BPOM Pusat dan peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan program dilaksanakan secara berkesinambungan. Oleh karena itu pada triwulan III Balai POM di Banyumas akan melaksanakan tahapan yang belum terealisasi. Adapun rekomendasi tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan yaitu:

1. Dilakukan pembinaan dan pemberian informasi yang lebih intensif tentang bahan berbahaya yang masih disalahgunakan pada produk pangan kepada pedagang yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya.
2. Mendorong lintas sektor yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pedagang yang masih menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Dilakukan tahapan pelaksanaan Sampling dan Pengujian sampel pangan.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan progress intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas antara lain adanya kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Dinas terkait menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kegiatan sesuai rencana serta adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Bupati Kabupaten Cilacap dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan. Sebagai rekomendasi perbaikan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya yaitu intensifikasi komunikasi dengan petugas pengelola pasar dalam pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan kerangka acuan kerja. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dilihat dari aspek internal dan eksternal antara lain:

1. Penjadwalan tahapan kegiatan disesuaikan dengan juknis pelaksanaan Program Desa Pangan Aman yang telah ditetapkan oleh Badan POM.
2. Meningkatkan efektivitas sumber daya (waktu dan petugas) dalam pelaksanaan program.



3. Pelaksanaan tahapan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor dalam rangka implementasi pasar pangan aman berbasis komunitas berjalan lancar.
4. Dukungan dari stakeholder terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik.
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Fasilitator Keamanan Pangan Pasar dan Bimbingan Teknis dan penyuluhan serta sosialisasi dari Kader keamanan Pangan Pasar kepada Komunitas Pasar.
6. Untuk pelaksanaan tahapan pengawasan dan monitoring evaluasi Fasilitator keamanan pangan pasar yang ditunjukkan dengan adanya SK Tim Keamanan Pangan Pasar.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

SS5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSS17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,00	50,00	50	100	50,00	100,00	100,00	54,95
Capaian SS5									100,00	100,00	54,95

Gambar 3. 6 Capaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

IKSS 17: Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Hingga akhir pelaporan Triwulan II 2025, realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan adalah 50% dengan target 50%. Capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 17 adalah 100% dengan kriteria **Baik**. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan” dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 17	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP	50	50	100	50	100 Baik



	CPPOB Pangan Olahan					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Tabel 3. 49 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	50	100	50	54,95 Perlu Upaya Keras 

Tabel 3. 50 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	108,35%	100%	Turun

Tabel 3. 51 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pendampingan UMKM merupakan kegiatan yang sangat bergantung pada



faktor eksternal, yaitu komitmen dan kesanggupan pelaku usaha dalam melaksanakan arahan fasilitator untuk mencapai terbitnya Sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB. Untuk itu, keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan pelaku usaha yang dijadikan target pendampingan. Sangat penting untuk memilih pelaku usaha yang memiliki komitmen dan kemauan yang kuat serta sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan, yaitu terbitnya Sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB.

Capaian pada Triwulan II sudah sesuai dengan target Triwulan II serta timeline pendampingan UMKM yang ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan maupun Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Capaian pada Triwulan II terlihat mengalami penurunan karena capaian pada Triwulan I yang melebihi 100%. Pendampingan UMKM pangan, obat tradisional dan kosmetik akan dilanjutkan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan sampai akhir tahun.

b. Upaya perbaikan / rencana tindak lanjut

Permasalahan yang sering dihadapi oleh fasilitator adalah pelaku usaha tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membuat sarana produksi yang sesuai dengan kaidah CPPOB/CPOTB/CPKB sehingga pembangunan sarana tersendat atau malah terhenti di tengah jalan. Padahal fasilitator ditargetkan untuk bisa mendampingi pelaku usaha sampai dengan terbitnya Sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB maksimal di akhir tahun berjalan. Untuk itu, fasilitator perlu mempersiapkan pelaku usaha cadangan untuk didampingi jika sekiranya pelaku usaha yang semula menjadi target pendampingan tidak bisa memenuhi tahapan sertifikasi pada tahun berjalan. Pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi tahapan sertifikasi pada tahun berjalan dapat terus didampingi dan diusahakan bisa menjadi target pendampingan pada tahun berikutnya.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan program pendampingan UMKM salah satunya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, misalnya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Koperasi dan UMK untuk menjangkau pelaku usaha yang sekiranya potensial dijadikan target pendampingan UMKM. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di awal tahun berjalan atau akhir tahun sebelumnya sebelum penentuan target pendampingan UMKM.

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

SS6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	68,00	0	0	71,67	105,40		95,56
Capaian SS6									105,40	105,40	95,56

Gambar 3. 7 Capaian Sasaran Strategis 8: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Banyumas



IKSS 18: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Hingga akhir pelaporan Triwulan II 2025, realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT adalah 71,67% dengan target 68%, sehingga capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 18 adalah 105,40% dengan kriteria **Sangat Baik**. Target bulanan IKSS 18 mulai bulan April TW II berubah menyesuaikan Perubahan rumus perhitungan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dari Kedeputan 4. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	68			71,67	105,40 Sangat Baik 

Tabel 3. 52 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	-	-	71,67	95,56 Akan Tercapai 

Tabel 3. 53 Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	740,78%	105,40%	Kenaikan, pada triwulan I capaian “tidak dapat disimpulkan” sedangkan triwulan II capaian dalam



	Olahan di UPT			kategori “sangat baik”.
--	---------------	--	--	-------------------------

Tabel 3. 54 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target perkara Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara, dan hingga Triwulan II Tahun 2025, realisasi capaian perkara sebanyak 1 (satu) perkara dan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh Balai POM di Banyumas adalah 71,67% dengan capaian terhadap target Triwulan II (68%) adalah 105,4 % dengan kategori **SANGAT BAIK**.

b. Upaya yang akan dilakukan / rencana tindak lanjut

Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan kejaksaan negeri Cilacap sehingga kegiatan pemberkasan berkas perkara yang dilakukan PPNS berjalan dengan optimal.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Koodinasi dengan CJS berjalan dengan lancar.

Sasaran Strategis 7: Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

SS7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50,00	0	0	50,00	100,00	100,00	55,56
Capaian SS7									100,00	100,00	55,56

Gambar 3. 8 Capaian Sasaran Strategis 7: Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT

IKSS 19: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Target realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar oleh Balai POM di Banyumas pada triwulan II adalah 50% dengan target 50%, sehingga capaian yang didapatkan adalah 100% dengan kategori **Baik**.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	-	-	50	100 Baik

Tabel 3. 55 Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	-	-	50	55,56 Perlu Upaya Keras 

Tabel 3. 56 Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Terhadap Target Tahunan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	100%	100%	Tidak Ada Perubahan

Tabel 3. 57 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar berjalan sesuai dengan target.

b. Upaya yang akan dilakukan / rencana tindak lanjut

Melaksanakan patroli siber dan kegiatan cegah tangkal untuk mendukung capaian



indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar berjalan sesuai dengan target.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar berjalan sesuai dengan target.

Sasaran Strategis 8: Layanan Publik UPT yang Prima

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahunan	Target Bulanan N	Realisasi TWI			% Capaian Thd Target Bulan N	% Capaian Normalisasi	% Capaian Thd Target Tahunan
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS8	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSS20	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	0	0	0	0	-		-
Capaian SS8									-	0,00	-

Gambar 3. 9 Capaian Sasaran Strategis 8: Layanan Publik Balai POM di Banyumas yang Prima

IKSS 20: Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 20 Indeks Pelayanan Publik UPT dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai sasaran strategis 8 tidak dihitung dalam NPSS triwulan II. Pada triwulan I juga tidak terdapat capaian sehingga tidak bisa dibandingkan dengan triwulan II.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS20	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	0	0	0	-

Tabel 3. 58 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKSS 20 adalah:

1. Dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik tahun 2025 yang menunjang dalam pembuatan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan tahun 2025 sehingga menjadi standar dan pedoman bagi seluruh petugas dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
2. Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik dalam setiap kesempatan pelatihan yang diberikan oleh BPOM Pusat sehingga meningkatkan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang prima dan membantu menyelesaikan permasalahan pelayanan yang dialami oleh pelaku usaha.
3. Pelayanan publik yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap dengan fasilitas yang ramah bagi disabilitas dan kategori rentan (lansia dan ibu hamil), untuk memastikan aspek inklusivitas tetap tercapai.



4. Tindak lanjut dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tahun 2024 yang menjawab masukan dan kebutuhan dari pelanggan/pelaku usaha.
5. Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) setiap bulan, dimana dilakukan tindak lanjut hasil survei untuk memastikan aspek kualitas dan integritas pelayanan tetap terjaga.
6. Peningkatan jangkauan pelayanan publik dengan memberikan pelayanan publik melalui zoom. Dengan peningkatan layanan ini, pelaku usaha dan masyarakat dapat menikmati seluruh jenis layanan dari Balai POM di Banyumas tanpa harus hadir di loket Mal Pelayanan Publik atau Kantor Balai POM di Banyumas.

b. Upaya yang akan dilakukan / rencana tindak lanjut

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja IKSS 20 antara lain:

1. Meningkatkan promosi kanal layanan publik untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat (kanal Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan Tiktok) termasuk layanan online via zoom.
2. Melaksanakan SPKP dan SPAK pada periode setiap bulan dan melakukan tindak lanjut terhadap masukan dan hasil analisa pelaporannya.
3. Melakukan tindak lanjut dari kegiatan Forum Konsultasi Publik tahun 2025 untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
4. Terus melanjutkan peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik agar mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat dan pelaku usaha.
5. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan III untuk selanjutnya mengevaluasi dan menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan target nilai sudah diumumkan pada Triwulan IV.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang menunjang capaian IKSS 20 antara lain:

1. Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih luas menjangkau masyarakat dan lebih memudahkan alur pelayanan, dengan pelayanan saat ini menggunakan layanan zoom sehingga pelaku usaha tidak perlu hadir di Mal Pelayanan Publik maupun Kantor Balai POM di Banyumas.
2. Tindak lanjut dari SPKP dan SPAK yang meningkatkan kinerja seluruh aspek pelayanan publik dan menghasilkan peningkatan capaian kinerja pelayanan publik.
3. Pelayanan yang distandarkan dengan adanya dokumen Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan.



Sasaran Strategis 9: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

SS9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSS21	Nilai AKIP UPT BPOM	77,96	0	0	0	0	-	-
		IKSS22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90	0	0	0	0	-	-
		IKSS23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	0	0	0	0	-	-
		IKSS24	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	50,00	18	35	51,43	102,86	
Capaian SS9								102,86	102,86	51,43

Gambar 3. 10 Capaian Sasaran Strategis 9: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

IKSS 21: Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 21 Nilai AKIP UPT BPOM dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai indikator kinerja sasaran strategis 21 tidak dihitung dalam sasaran strategis 9. IKSS ini tidak bisa dibandingkan antara triwulan I dan triwulan II karena belum memiliki capaian tiap triwulan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS21	Nilai AKIP UPT BPOM	77,96	0	0	0	-

Tabel 3. 59 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian IKSS 21 dilakukan pada akhir tahun, untuk mendukung tercapainya target dilakukan:

1. Balai POM di Banyumas mengupayakan implementasi SAKIP mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi internal sesuai Pedoman;
2. Memenuhi Kriteria komponen pengukuran kinerja;
3. Menyajikan data Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP;
4. Menyusun laporan dengan menyajikan data yang akuntabel.

b. Upaya yang akan dilakukan / rencana tindak lanjut

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja IKSS 21 antara lain:

1. Melakukan evaluasi di setiap bulan atau triwulan untuk melakukan pengecekan keselarasan data yang dilaporkan.
2. Segera melakukan revisi terhadap laporan yang dibuat jika terjadi perubahan data dengan menambahkan catatan terhadap perubahan yang dilakukan.



c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan peningkatan nilai antara lain:

1. Monev kinerja dan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan tercapainya target indikator kinerja setiap bulan;
2. Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target indikator kinerja.

IKSS 22: Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 22 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai indikator kinerja sasaran strategis 22 tidak dihitung dalam sasaran strategis 9. IKSS ini dinilai di akhir tahun sehingga tidak bisa dibandingkan antara capaian triwulan I dengan capaian triwulan II.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	92,44	0	0	0	-

Tabel 3. 60 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian IKSS 22 dilakukan pada akhir tahun, untuk mendukung tercapainya target dilakukan:

1. Menyelesaikan revolving GUP dilakukan sesuai ketentuan, dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo revolving GUP.
2. Melakukan Revisi DIPA sesuai dengan jadwal dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan dalam satu triwulan/semester;
3. Memonitoring dan penyesuaian Revisi Halaman III DIPA secara rutin;
4. Data Kontrak disampaikan tepat waktu.

b. Upaya yang akan dilakukan / rencana tindak lanjut

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 22 antara lain:

1. Melakukan pemetaan terhadap sisa anggaran yang ada terhadap kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan revisi apabila diperlukan terhadap anggaran dan kegiatan yang belum dan akan dilakukan;
2. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggarannya dengan mengajukan revisi halaman III DIPA secara tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas data capaian output melalui Sistem Aplikasi Monev DJA dan Aplikasi SAKTI yang dikonfirmasi oleh KPPN dengan mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online.



c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Membuat Program Monitoring dan Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran dalam pembahasan rapat evaluasi bulanan oleh Ketua Tim masing-masing fungsi dengan mempertimbangkan perencanaan dalam Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

IKSS 23: Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 23 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai indikator kinerja sasaran strategis 23 tidak dihitung dalam sasaran strategis 9. Selanjutnya, belum terdapat capaian antara triwulan I dengan triwulan II sehingga tidak dapat dibandingkan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	0	0	0	-

Tabel 3. 61 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian IKSS 23 dilakukan pada akhir tahun, untuk mendukung tercapainya target dilakukan:

1. Update Daftar Resiko tahun 2025;
2. Penyusunan serta penyampaian laporan manajemen resiko semester I tahun 2025;
3. Distribusi indikator kinerja Indeks Manajemen Resiko kepada seluruh pegawai melalui Matrik Peran Hasil pada penyusuann SKP tahun 2025.

b. Upaya yang akan dilakukan / rencana tindak lanjut

Beberapa hal yang akan dilakukan dalam meningkatkan / mempertahankan capaian kinerja IKSS 22 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan manajemen resiko melalui aplikasi SAPA APIP;
2. Penyusunan laporan pelaksanaan manajemen resiko pada semester II Tahun 2025.



c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Kerjasama antar pemilik resiko/PIC penanggung jawab kegiatan sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya resiko/kegagalan tercapainya tujuan organisasi.

IKSS 24: Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Target Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan II 2025 adalah 50% dan untuk realisasinya sebesar 51,43%, sehingga capaian terhadap target adalah 102,86% dengan kategori **Sangat Baik**. Salah satu rencana kerja ZI yang dilaksanakan di TW II adalah kegiatan Pencanangan Zona Integritas Balai POM di Banyumas. Balai POM di Banyumas resmi mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Purbalingga pada Rabu, 25 Juni 2025. selain Pencanangan ZI kegiatan yang dilaksanakan di TW II antara lain SUMRINGAH (Support Mental dan Religi untuk Gapai Harmoni, Layanan Konsultasi Online via Zoom, Employee of The Quarter (EOTQ), INFO OMA for UMKM (Informasi Obat dan Makanan bagi UMKM), Podcast NGODE (NGobrol DEngan).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS24	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	50	18	35	51,46	102,86 Sangat Baik 

Tabel 3. 62 Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Triwulan II 2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2025	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan
			2025			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS24	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100	18	35	51,46	51,43 Perlu Upaya Keras 

Tabel 3. 63 Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Terhadap Target Tahunan



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		% Capaian Triwulan I	% Capaian Triwulan II	Kenaikan / Penurunan Capaian
IKSS 24	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	102,86%	102,86%	Tidak Ada Perubahan

Tabel 3. 64 Perbedaan Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Komitmen yang kuat untuk mensukseskan program dari semua unsur pelaksanaan Zona Integrasi (ZI) dari pimpinan sampai dengan pelaksana tingkat bawah;
2. Peran agent perubahan untuk memastikan program ZI tercapai melalui program inovasi tiap agent perubahan;
3. Kerjasama yang solid antara Tim ZI dan Agent perubahan Balai POM di Banyumas.

b. Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja untuk memaksimalkan anggaran yang terbatas dengan melaksanakan kegiatan memanfaatkan kegiatan lain yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan ZI dan Agen Perubahan.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Beberapa program membutuhkan anggaran penyelenggaraan;
2. Monitoring dan evaluasi rencana kerja ZI dimonitor dan dilaporkan kepada Kepala Balai secara berkala setiap bulan pada rapat monev kinerja bulanan Balai POM di Banyumas.



3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

NO	Indikator	Target Bulanan N	Realisasi	% Capaian Thd Target Bulan N	Kondisi Awal/Penjelasan	Rekomendasi/Arahan Kepala Balai POM di Banyumas	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
								Rencana Aksi yang sudah Selesai	Belum		
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00%	83,32%	101,61%	Tercapai sesuai renlak	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Berkoordinasi terkait cara pengisian dan perhitungan RAPK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat pengampu serta BBPOM Semarang	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open
2	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00%	78,99%	105,32%	Tercapai sesuai renlak	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Berkoordinasi terkait cara pengisian dan perhitungan RAPK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat pengampu serta BBPOM Semarang	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open
3	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00%	85,00%	100,00%	rumus tidak dapat menyimpulkan persentase karena tidak terdapat sampel yang TMS	Perlu dikaji lagi untuk tools assesment	TW III	Berkoordinasi terkait cara pengisian dan perhitungan RAPK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat pengampu serta BBPOM Semarang	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	Open



4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	Tidak ada sampel KLB, sesuai DO capaian tetap dihitung 100%	dipastikan kembali tidak ada KLB di 4 kabupaten, bisa konfirmasi ke dinas kesehatan	TW III	Tidak ada sampel KLB, sesuai DO capaian tetap dihitung 100%	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	96,00%	96,43%	100,45%	Tercapai sesuai renlak	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Berkoordinasi terkait cara pengisian dan perhitungan RAPK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat pengampu serta BBPOM Semarang	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	87,50%	102,94%	Tercapai sesuai renlak	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Berkoordinasi terkait cara pengisian dan perhitungan RAPK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat pengampu serta BBPOM Semarang	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	83,33%	104,16%	Tercapai sesuai renlak	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Berkoordinasi terkait cara pengisian dan perhitungan RAPK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat pengampu serta BBPOM Semarang	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open



8	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25%	93,87%	100,66%	Tercapai sesuai renlak	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	melakukan pemeriksaan dilakukan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dan masing-masing Kedeputan	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00%	81,54%	108,72%	Tercapai sesuai renlak	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Berkoordinasi terkait cara pengisian dan perhitungan RAPK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat pengampu serta BBPOM Semarang	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open
10	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,58%	91,17%	102,92%	Tercapai sesuai renlak	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Berkoordinasi terkait cara pengisian dan perhitungan RAPK dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktorat pengampu serta BBPOM Semarang	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	open
11	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00%	63,00%	100,00%	Sudah tercapai untuk target tahun 2025	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Sudah tercapai untuk target tahun 2025	melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana	TW III	Sudah tercapai untuk target tahun 2025



12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	0,00%	1. Capaian fisik bulan mei adalah 7 sesuai dengan hasil perhitungan SKL 2. Target SKL sudah dihitung dari tw1-tw4 (Target tw1=5 ; tw2=7 ; tw3=9 ; tw4=11) 3. Pengujian obat (sampel napza) dilakukan mulai bulan Juli/ agustus	diperhatikan kembali untuk perubahan SKL untuk pemenuhan standar Lab sesuai dengan yang baru dari P3OMN,	s/d TW IV 2025	perhitungan SKL TW 2 = 7	pengujian sampel obat sesuai dengan ruang lingkup	s/d TW IV 2025	open
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,71	89,33	101,85%	Total responden Bulan April sejumlah 95 orang yang merupakan 22 peserta KIE CFD HUT ke-24 BPOM pada bulan Januari, 22 orang responden KIE Media pada bulan Februari, 7 orang responden KIE Media pada bulan Maret, 16 responden Forum Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan Balai POM di Banyumas dan 9 responden KIE Media Sosial Tahun 2025 pada bulan April, 21 responden KIE Keamanan Pangan dan Pencegahan Stunting pada Bulan Mei 2025, dan 11 responden KIE Sosial Media Triwulan II Balai POM di Banyumas	Perhatikan laporan hasil survei KIE agar dilaporkan tepat waktu, dimasukkan materi terkait AMR, ABSO, PV, dan stunting di setiap materi KIE (pasar, desa, sekolah). dilakukan dokumentasi saat pemberian materi tersebut.	Juli	1. Menjawab kebutuhan pelanggan sesuai dengan yang dibutuhkan 2. Memastikan jawaban yang diberikan sesuai dengan harapan konsumen	1. Menjawab kebutuhan pelanggan sesuai dengan yang dibutuhkan 2. Memastikan jawaban yang diberikan sesuai dengan harapan konsumen	Juli	open
14	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS)	50%	50,00%	100,00%	"Capaian fisik dinilai pada akhir tahun, kegiatan mundur dari rencana karena adanya	dikoordinasikan dengan pusat untuk setiap pelaksanaan kegiatan dan disimpan bukti	TW III & IV	Koordinasi dan Advokasi (Bulan April 2025)	Bimtek Kader (8 Juli 2025)	TW III - TW IV	open



	aman				kalender pendidikan, dan adanya SE dari PMPUPO terkait pergeseran rencana pelaksanaan Sosialisasi dari Mei menjadi Juni.	adminsitrasi		Sosialisasi Keamanan Pangan (Bulan Juni 2025)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (TW 3-TW4)		
15	Jumlah desa pangan aman	75%	75,00%	100,00%	Capaian dinilai pada akhir tahun Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan (April) 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah (Mei) 3. Bimtek Komunitas (Juni) 4. Monev (Agustus)	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Monev Bulan Agustus dan pelaporan maksimal 30 hari setelah pelaksanaan (September)	3 dari 4 tahapan	1 dari 4 tahapan berupa monev	Monev Bulan Agustus dan pelaporan maksimal 30 hari setelah pelaksanaan (September)	open
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75%	75,00%	100,00%	Capaian dinilai pada akhir tahun Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan (Januari - April) 2. Bimtek dan Penyuluhan komunitas Pasar (Maret - Juni) 3. Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar (Maret - Juni) 4. Pengawasan keamanan pangan dan monev pasar (Mei - Juli)	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%;	1. Pengawasan dan Monev bulan Juli 2025 dan pelaporan di bulan agustus 2025	Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan pada bulan April 2. Bimtek dan Penyuluhan komunitas Pasar pada bulan Mei 3. Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar pada bulan Juni	1. Pengawasan keamanan pangan dan monev pasar	1. Pengawasan dan Monev bulan Juli 2025 dan pelaporan di bulan agustus 2025	open



17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50,00%	50,00%	100,00%	target tercapai, untuk pendampingan UMKM mengacu dari arahan BPOM, dan timeline dari dir. PMPU	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW IV	Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pangan, obat bahan alam dan kosmetik sesuai tahapan yang ditentukan oleh Direktorat PMPU Pangan dan OTSKKos	Melanjutkan tahapan pendampingan UMKM sampai dengan penerbitan Rekomendasi SPA CPKB, Rekomendasi CPOTB Bertahap dan Sertifikat CPPOB	TW IV	open
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	68,00%	71,67%	105,40%	sudah sesuai target	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	Koordinasi dengan dept 4 untuk penyesuaian target untuk perhitungan ulang, bersurat ke roren untuk penyesuaian target	melaksanakan proses penyidikan seseuai prosedur	TW III	open
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50,00%	50,00%	100,00%	sudah sesuai target	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III		Melaksanakan analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	TW III	open
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	0		0,00%	Capaian dinilai pada akhir tahun	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	s.d TW IV 2025	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat telah dimulai pada bulan April 2025, dan SPKP serta SPAK telah dilaksanakan setiap bulan	Penyelesaian SKM hingga Agustus 2025, dan hasil pelaporan pada akhir tahun 2025	s.d TW IV 2025	open



21	Nilai AKIP UPT BPOM	0		0,00%	Capaian dinilai pada akhir tahun	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	melaksanakan rekomendasi hasil penialaian SAKIP TH 2024 TW II	melaksanakan rekomendasi hasil penialaian SAKIP TH 2024 TW III	TW III	open
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0		0,00%	Capaian dinilai pada akhir tahun	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	Oktober	Melaksanakan Monev anggaran s.d bulan Juni	Melaksanakan Monev anggaran s.d bulan September	Oktober	open
23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0		0,00%	penyusunan laporan semester 1	dikawal agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%	TW III	penyusunan laporan semester 1	penyusunan laporan semester 2	TW III	open
24	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	50,00%	51,43%	102,86%	Pencanangan ZI, SUMRINGAH (Support Mental dan Religi untuk Gapai Harmoni), Layanan Konsultasi Online via Zoom	untuk setiap pokja menyampaikan laporan progres pelaksanaan program RB	TW III	rencana aksi yang dilaksanakan TW II Pencanangan ZI, SUMRINGAH (Support Mental dan Religi untuk Gapai Harmoni, Layanan Konsultasi Online via Zoom	Melaksanakan Rencana Aksi TW III	TW III	open

Tabel 3. 65 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis



3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Balai POM di Banyumas memperoleh anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-063.01.2.672844/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 8.033.570.000,- dengan anggaran terblokir sebesar Rp. 4.485.016.000,-. Dari total anggaran tersebut, pada Triwulan II tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 1.940.685.414, - atau telah digunakan sebesar 54,69% dari pagu yang bisa digunakan.

Pengelolaan anggaran di Balai POM di Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut tabel efisiensi anggaran Balai POM di Banyumas.



No	Indikator	Bulan	Output			Input Anggaran			IE	TE	Kriteria
			Target s.d Bulan Juni	Realisasi s.d Bulan Juni	%	Pagu	Realisasi s.d Bulan Juni	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	82,00%	83,32%	101,61%	Rp 33.555.000,00	Rp 7.850.618,00	23,40%	0.74	-0.26	Tidak Efisien
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75,00%	78,99%	105,32%	Rp 32.066.000,00	Rp 5.401.800,00	16,85%	1.07	0.07	Efisien
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	85,00%	85,00%	100,00%	Rp 32.066.000,00	Rp 5.401.800,00	16,85%	0.00	0.00	Efisien
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	100,00%	100,00%	100,00%	Rp 32.066.000,00	Rp 5.401.800,00	16,85%	0.99	-0.01	Tidak Efisien
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	96,00%	96,43%	100,45%	Rp 153.457.000,00	Rp 19.070.000,00	12,43%	1.38	0.38	Efisien
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00%	87,50%	102,94%	Rp 61.658.000,00	Rp 3.180.000,00	5,16%	3.23	2.23	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80,00%	83,33%	104,16%	Rp 66.900.000,00	Rp 4.440.000,00	6,64%	0.00	0.00	Efisien
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	93,25%	93,87%	100,66%	Rp 190.725.000,00	Rp 22.080.000,00	11,58%	0.00	0.00	Efisien
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75,00%	81,54%	108,72%	Rp 40.789.000,00	Rp 5.722.000,00	14,03%	1.22	0.22	Efisien
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	88,58%	91,17%	102,92%	Rp 5.210.000,00	Rp 342.500,00	6,57%	2.55	1.55	Efisien
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	63,00%	63,00%	100,00%	Rp 6.204.000,00	Rp 1.020.000,00	16,44%	1.01	0.01	Efisien
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	0	0	0						N/A
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juni	87,71	89,33	101,85%	Rp 112.217.000,00	Rp 12.629.500,00	11,25%	1.37	0.37	Efisien
14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	50%	50,00%	100,00%	Rp 87.993.000,00	Rp 1.000.000,00	1,14%	0.00	0.00	Efisien
15	Jumlah desa pangan aman	Juni	75%	75,00%	100,00%	Rp 144.525.000,00	Rp 6.227.000,00	4,31%	0.00	0.00	Efisien
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	75%	75,00%	100,00%	Rp 83.836.000,00	Rp 1.000.000,00	1,19%	0.00	0.00	Efisien
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Juni	50,00%	50,00%	100,00%	Rp 35.205.000,00	Rp 2.740.000,00	7,78%	1.86	0.86	Efisien
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juni	68,00%	71,67%	105,40%	Rp 104.479.000,00	Rp 47.474.000,00	45,44%	0.67	-0.33	Tidak Efisien
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Juni	50,00%	50,00%	100,00%	Rp 45.879.000,00	0.00	0,00%	0.00	0.00	Efisien
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	0		0						N/A
21	Nilai AKIP UPT BPOM	Juni	0		0						N/A
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Juni	0		0						N/A
23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Juni	0		0						N/A
24	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Juni	50,00%	51,43%	102,86%	Rp 20.802.000,00	Rp 1.860.000,00	8,94%	1.75	0.75	Efisien
					101,94	1.289.632.000,00	152.841.018,00	12,60%	8,09	7,1	Tidak Efisien

Gambar 3. 11 Tabel Efisiensi Anggaran Balai POM di Banyumas

Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Balai POM di Banyumas mencatat perbandingan antara realisasi anggaran dan pencapaian target kegiatan pengelolaan anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar 55%, yang termasuk dalam kriteria "Tidak Efisien". Dari 24 (duapuluh empat) indikator kinerja sasaran strategis 15 masuk kriteria Efisien, 4 masuk kriteria Tidak Efisien, dan 5 yang belum bisa didefinisikan. Data perhitungan tersebut bersumber dari laporan e-performance, di mana nominal pagu yang digunakan masih merujuk pada pagu anggaran sebelum terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Balai POM di Banyumas tetap berkomitmen untuk melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran pada triwulan berikutnya



melalui strategi penyesuaian prioritas kegiatan, peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya, dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait guna mencapai efisiensi yang lebih baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hal yang telah dilakukan dalam upaya mencapai efisiensi anggaran agar dapat mencapai kategori efisien antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran dilakukan secara rutin setiap awal bulan untuk mengevaluasi bulan sebelumnya;
2. Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut untuk memastikan tercapainya target fisik maupun anggaran;
3. Pemanfaatan revisi halaman III DIPA untuk memperbaiki rencana penarikan anggaran;
4. Perbaikan penganggaran menyesuaikan kebutuhan kegiatan melalui revisi POK rutin setiap bulan



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Seluruh Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Pengelolaan anggaran Balai POM di Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien;
3. Berdasarkan hasil evaluasi dari 24 indikator kinerja Balai POM di Banyumas terdapat 8 indikator yang masuk dalam kategori baik, 11 indikator masuk kategori sangat baik, dan 5 indikator yang belum ada capaian karena penilaian dilakukan pada akhir tahun;
4. Kinerja yang tercapai akan dipertahankan, kinerja yang belum tercapai akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi untuk dapat meningkatkan capaian;
5. Terhadap capaian tahapan Program PJAS Aman perlu dilakukan koordinasi untuk memastikan tahap sosialisasi dilaksanakan secara seksama di Triwulan III;
6. Berdasarkan evaluasi kinerja TW I beberapa indikator kinerja perlu dilakukan penyesuaian target tahunan maupun bulanan untuk menyesuaikan perubahan rumus perhitungan capaian kinerja maupun perubahan penetapan target dari unit pengampu indikator kinerja. Pada TW II usulan perubahan target tersebut telah dikoordinasikan dengan unit pengampu dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penetapan kembali Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025.

4.2 SARAN

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Banyumas dapat lebih optimal, yaitu:

1. Meningkatkan peran masing-masing fungsi agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan ketersediaan anggaran untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran;
2. Melaksanakan rekomendasi/tindak lanjut hasil monev agar target dan realisasi sesuai dengan perencanaan sehingga capaian di angka 100% s.d 110%;
3. Terhadap IKSS yang belum efektif, perlu dilakukan monitoring yang lebih ketat dengan mempertimbangkan analisis kendala dalam pencapaian target pada Triwulan III;
4. Menggunakan anggaran secara efektif dan efisien melalui perencanaan dan monitoring penggunaan anggaran secara periodik minimal 1 kali sebulan;
5. Memastikan capaian tahapan Program PJAS Aman (terutama sosialisasi dan bimtek) sudah terlaksana sesuai target capaian pada Triwulan III.



LAMPIRAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PR.07.21.06.25.163
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Usulan Perubahan
Target Bulanan RAPK Balai POM di
Banyumas Tahun 2025

Jakarta, 2 Juni 2025

Yth. Kepala Balai POM di Banyumas
di Kabupaten Banyumas

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai POM di Banyumas nomor B-PR.07.024A.05.25.236 tanggal 27 Mei 2025 perihal Usulan Perubahan Target Indikator Kinerja B4 s.d B11, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM RI nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, RAPK merupakan lampiran dari Perjanjian Kinerja (PK). Adapun revisi perubahan target bulanan pada RAPK pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan tetap memastikan target akhir tahun (B12) tetap sesuai dengan target pada dokumen PK.
2. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mereviu dan mempertimbangkan justifikasi usulan revisi target Bulanan pada dokumen RAPK Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
3. Adapun tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Balai POM di Banyumas adalah:
 - a. Agar dapat segera melakukan penyesuaian RAPK melalui aplikasi Simetris serta melakukan pengunggahan dokumen RAPK yang telah ditandatangani oleh Kepala UPT melalui bit.ly/PK-RAPK-2025 khususnya pada folder "Revisi RAPK 2025", dan
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Monitoring dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka penyesuaian data pada monev kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



2

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



- 3 -

Lampiran
Surat Dinas Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan
Nomor : B-PR.07.21.06.25.163
Tanggal : Juni 2025

No	Indikator	Justifikasi Unit Kerja	Hasil Reviu
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Target bulanan flat belum dibreakdown di tiap bulannya	Usulan penyesuaian target dapat disepakati
2	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Perhitungan sesuai rumus tidak memungkinkan target flat per bulan karena target bisa tidak tercapai di bulan-bulan tertentu	Mengingat target b1-b3 tidak dapat dilakukan perubahan karena telah melewati periode revisi dan telah dilaporkan pada evaluasi interm TW I serta mengacu ketentuan dan mekanisme revisi RAPK berdasarkan Surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 tentang Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 yaitu perubahan target harus lebih besar/ sama dengan realisasi target bulanan dan target bulan sebelumnya maka usulan perubahan target tidak disepakati karena mengakibatkan penurunan target pada dokumen RAPK.
3	Jumlah desa pangan aman	Target tahapan pelaksanaan kegiatan belum dibreakdown dalam target bulanan	Usulan penyesuaian target dapat disepakati
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PR.07.21.05.25.124
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Tanggapan atas Usulan Perubahan
Target Bulanan RAPK Balai POM di
Banyumas Tahun 2025

Jakarta, 7 Mei 2025

Yth. Kepala Balai POM di Banyumas

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai POM di Banyumas nomor B-PR.04.02.24B.04.25.176 tanggal 29 April 2025 perihal Usulan Perubahan Target Indikator Kinerja, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM RI nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, RAPK merupakan lampiran dari Perjanjian Kinerja (PK). Adapun revisi perubahan target bulanan pada RAPK pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan tetap memastikan target akhir tahun (B12) tetap sesuai dengan target pada dokumen PK.
2. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mereviu dan mempertimbangkan justifikasi usulan revisi target Bulanan pada dokumen RAPK Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
3. Adapun tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Balai POM di Banyumas adalah:
 - a. Agar dapat segera melakukan penyesuaian RAPK melalui aplikasi Simetris serta melakukan pengunggahan dokumen RAPK yang telah ditandatangani oleh Kepala UPT melalui bit.ly/PK-RAPK-2025 khususnya pada folder "Revisi RAPK 2025", dan
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Monitoring dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka penyesuaian data pada monev kinerja.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



2

LAMPIRAN

Surat Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Nomor : B-PR.07.21.05.25.124

Tanggal : 7 Mei 2025

No	Indikator	Justifikasi Unit Kerja	Hasil Reviu
1	Jumlah sekolah panganjajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Sesuai hasil desk dengan PMPU PO, target dikembalikan ke 2, apabila tidak tercapai baru dipaparkan justifikasinya	Agar di exercise kembali target bulanan (B04-B11) berdasarkan rata-rata dari progress kegiatan sebagaimana tahapan yang ditetapkan pada manual IKU. Target akhir tahun (b12) agar disesuaikan menjadi 2 Sekolah agar konsisten dengan target pada DIPA Awal 2025
2	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perubahan rumus perhitungan persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dari Deputi 4	Usulan penyesuaian target dapat disepakati

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI KABUPATEN BANYUMAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIDION

Jabatan : Kepala Balai POM di Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banyumas, 21 March 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Banyumas

GIDION

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI KABUPATEN BANYUMAS

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 % 75 % 100 % 85 % 96 % 85 % 80 % 93.25 % 75 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.58 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 jumlah
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 03 - Jumlah desa pangan aman 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	87.71 nilai 2 jumlah sekolah 1 jumlah desa 1 jumlah pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	77.96 % 5 Indeks 2.8 Indeks 100 %

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8,033,570,000 (Delapan Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,074,218,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,959,352,000

Banyumas, 21 March 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Banyumas

GIDION

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI KABUPATEN BANYUMAS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	33,555,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	57	75	75	75	29,180,060
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	320,660
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	2,565,280
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	6,418,560



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23,368,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	51,380,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	189,989,440
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	31,070,500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	88.58	3,907,500
2.	02 - Meningkatnya	01 - Persentase cakupan sarana	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	6,204,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	0	0	0	0	3	7	10	11	11	11	96,016,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.71	87.71	87.71	87.71	87.71	87.71	87.71	87.71	87.71	87.71	87.71	87.71	112,217,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	25	50	50	75	75	75	100	100	2	87,993,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	25	50	75	75	100	100	100	100	1	144,525,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	1	92,341,000
5.	05 - Meningkatnya	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	91	35,205,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3	6	9	66	68	68	70	70	72	72	75	75	104,479,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,879,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	72,024,000



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.96	6,768,200,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	31,930,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2,130,000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	0	15	25	30	40	50	60	70	75	85	90	100	62,672,000
Total															8,033,570,000

Banyumas, 10 June 2025

Kepala Balai POM di Banyumas



JIDION

